

GUBERNUR SUMATERA BARAT



**NOTA JAWABAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

Padang, Desember 2009

**NOTA JAWABAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT
ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua serta seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Yth. Rekan-rekan Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli dan Kepala SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan BUMN/BUMD di Provinsi Sumatera Barat

Yth. Rekan-rekan Wartawan, Undangan, dan Hadirin yang berbahagia.

I. PENDAHULUAN

Mengawali penyampaian Nota Jawaban ini, perkenankanlah saya mengajak seluruh hadirin mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan kurnia NYA, hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyampaian Nota Jawaban

atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2010.

Selanjutnya perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan Nota Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2010 yang telah disampaikan oleh Anggota Dewan Yang Terhormat pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 8 Desember yang lalu.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Setelah menyimak dengan cermat pemandangan umum yang disampaikan Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2010, saya melihat bahwa masukan, usulan dan saran yang disampaikan telah memiliki persepsi yang sama terhadap program kerja dan kegiatan yang direncanakan. Keseluruhan masukan, usulan dan saran serta pertanyaan yang disampaikan itu tidak hanya didorong oleh keinginan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi juga dimotivasi oleh keyakinan bahwa kita ini adalah pimpinan yang kelak akan

mempertanggungjawabkan amanah dan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat kepada Allah SWT

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2010, kita dihadapkan pada keterbatasan waktu, namun demikian pemerintah daerah bersama DPRD telah mempunyai komitmen yang sama bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2010 ini sedapat mungkin telah disetujui oleh DPRD sebelum tahun anggaran berakhir, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember yang akan datang. Mudah-mudahan komitmen tersebut menjadi motivasi bagi kita untuk bekerja keras dan dapat menggunakan waktu yang memang sempit ini tanpa mengenal lelah, semoga semua kerja keras, pengabdian dan ketulusan hati kita, tidak hanya akan menjadi amal saleh disisi Allah SWT, akan tetapi juga semakin meningkatnya kepercayaan rakyat dan pemerintah kepada kita

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan ucapan terima kasih atas ucapan selamat yang disampaikan kepada saya atas pelantikan saya sebagai Gubernur pada tanggal 7 Desember yang lalu. Disamping itu terima kasih juga diucapkan atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh Anggota Dewan Yang Terhormat terhadap keberhasilan kita selama menjalankan roda pemerintahan selama 4 tahun ini, namun sekali lagi disampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras kita bersama, karena tanpa adanya kerjasama yang baik, keberhasilan tersebut akan sulit dapat kita capai.

Sebelum saya menyampaikan nota jawaban ini, sepintas marilah kita sama-sama mereview kembali tentang sistem otonomi daerah yang telah lama kita terapkan, hal ini perlu kita sampaikan agar kita mempunyai persepsi yang sama dalam menjalankan roda pemerintahan selanjutnya. Dengan terbukanya sistem otonomi daerah akan terbuka peluang bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang lebih leluasa sesuai dengan batas kewenangan yang kita miliki.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Melalui rapat paripurna penyampaian pemandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2010 ini, telah disampaikan pandangan, pendapat, himbauan, pertanyaan, saran dan usul dari 7 Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu dari :

- A. Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicara Sdr. Liswandi,
SE**
- B. Fraksi Partai Ukhuwah dengan juru bicara Sdr. Martias
Tanjung, S,Ag**
- C. Fraksi Partai Golkar dengan juru bicara Sdr. Musmaizar,
SIP, Dt. Gamuak**
- D. Fraksi Partai Hanura dengan juru bicara Sdr. Drs. H. Marlis,
MM**

- E. Fraksi Partai Amanat Nasional dengan juru bicara Sdr. Ir. Israr Jalinus**
- F. Fraksi Partai Perjuangan Reformasi dengan juru bicara Sdr. Ir. Bachtul**
- G. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan juru bicara Sdr. Mochlasin, S.Si**
- H. Fraksi Partai Gerindra dengan juru bicara Sdr. Darmawi, B.Sc**

II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN, TANGGAPAN, SARAN DAN USUL FRAKSI-FRAKSI DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT TERHADAP PEMANDANGAN UMUM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2010.

A. JAWABAN ATAS TANGGAPAN, PERTANYAAN, USUL DAN SARAN DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

1. Sehubungan dengan penjelasan terhadap capaian target kinerja 7 agenda pembangunan RPJMD selama tiga tahun terakhir yang tidak terukur keberhasilannya, karena tidak tergambar target kinerja yang seharusnya dicapai Rancangan APBD Tahun 2010, dapat di jelaskan bahwa sesuai dengan hasil evaluasi RPJMD Sumatera Barat tahun 2006 – 2010, rincian capaian target kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

a. Agenda Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dan Sosial Budaya

Kondisi tahun 2008 terlihat adanya peningkatan capaian kinerja dari tahun 2006 terhadap kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya. Hal ini ditandai dengan peningkatan sarana dan prasarana beribadah dari 11.876 unit rumah ibadah menjadi 12.010 unit; pengadaan Alqur'an dan buku agama untuk pustaka mesjid, pusat pembinaan dan pengembangan keagamaan dari 7.732 buku menjadi 19.430 buku, keluarga sakinah dan pemberdayaan pesantren juga meningkat dari 1660 keluarga sakinah menjadi 1.982 keluarga sakinah

dan 267 pesantren menjadi 303 pesantren. Sementara pengembangan nilai-nilai kebudayaan daerah juga dilakukan pada lembaga seni dan budaya terutama budaya tradisional dari sebanyak 369 sanggar menjadi 510 sanggar, serta terlaksananya pemeliharaan koleksi museum daerah dari 6.025 menjadi 6.212 koleksi, fasilitasi ketersediaan buku dan pembinaan perpustakaan budaya minangkabau dari 2.080 buku menjadi 3.650 buku, fasilitasi dan pemeliharaan koleksi museum daerah sebanyak 6.025 buah menjadi 6.212 buah serta capaian pelanggaran terhadap peraturan daerah nomor 11 tahun 2006 tentang penanggulangan maksiat dari 225 kasus turun menjadi 208 kasus.

b. Agenda Membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas

Pada tahun 2008 pencapaian perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada masyarakat menunjukkan peningkatan dari terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan yaitu angka partisipasi kasar (APK), tingkat pendidikan SD/MI/Paket A dari 113,37% menjadi 115,82%, tingkat SMP/MTs/SMPLB/Paket B dari 88,28% menjadi 96,08% dan untuk tingkat SMA/SMK/MALB/Paket C pada dari 64.71% menjadi 68.56% pada. Sementara untuk angka partisipasi murni (APM) terlihat juga mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan, yaitu untuk tingkat SD/SDLB/Paket A sebesar 97,61% menjadi 99,67%, tingkat SMP/MTs/SMPLB/Paket B dari 70.62% menjadi 75,91% dan tingkat SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C dari

49,136 % menjadi 55,50% pada tahun 2008. Untuk capaian indikator yang lain seperti kualifikasi pendidikan guru setara S1/Diploma IV dan sertifikasi guru juga mengalami peningkatan dengan indikator SD dari 15,00% menjadi 18,41%, SMP dari 74,13% menjadi 61,01%, SMA dari 83,12% menjadi 85,00%, serta SMK dari 81,51% menjadi 82,42%.

Capaian kinerja jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan juga mengalami peningkatan yang diperlihatkan dengan indikator angka harapan hidup dari 68,6 menjadi 68,9, angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup dari 36,0 turun menjadi 28,5 kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan per seribu kelahiran hidup dari 230 turun menjadi 215,9. Untuk indikator prevalensi gizi kurang pada anak balita juga memperlihatkan angka yang cukup menggembirakan yakni dari sebesar 12,90% berkurang menjadi 11,02%, selanjutnya persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat mengalami peningkatan dari 37% menjadi 51%

c. Agenda Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Baik.

Telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pemerintah daerah serta kompetensi jabatan, peningkatan sumberdaya aparatur, standar rekrutmen, promosi, mutasi aparatur, pengisian pakta integritas dan laporan harta kekayaan pejabat negara, disamping peningkatan supremasi hukum yang diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan penegakan baik oleh lembaga penegak hukum

maupun instansi lainnya yang terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka peningkatan kualitas dan transparansi pelayanan publik Pemerintah daerah telah melaksanakan pelayanan satu pintu, penetapan SPM serta pembangunan e-gov antara lain untuk pelayanan informasi dan tender elektronik. Capaian kinerja untuk indikator kompetensi jabatan sebesar 60% menjadi 85%, indikator efektifitas Perda yang dihasilkan sebesar 45% menjadi 55% tahun.

d. Agenda Membangun Ekonomi Yang Tangguh Dan Berkeadilan

Indikator laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun 2006 sebesar 6,14% menjadi 6,37% pada tahun 2008, sedikit dibawah target sebesar 6,4 %, namun sudah melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. PDRB Sumatera Barat sebesar Rp.53,03 triliun harga berlaku menjadi Rp.70,61 triliun, PDRB perkapita dari Rp.11,44 juta menjadi Rp.14,72 juta. Jumlah PMDN juga mengalami peningkatan dari sebesar Rp.234,86 milyar sebesar Rp.608,92 milyar. Hal sama juga terjadi peningkatan volume ekspor dari 3.315.422 ton menjadi 3.987.367 ton dengan nilai ekspor sebesar US\$ 1,14 Milyar menjadi US\$ 2,01 Milyar.

e. Agenda Membangun Infrastruktur Yang Mendorong Percepatan Pembangunan

Terlaksananya peningkatan dari tahun 2006 ke tahun 2008 terhadap pemanfaatan sumberdaya air, peningkatan sarana

prasarana transportasi, peningkatan prasarana perumahan dan permukiman serta pengembangan energi listrik, bahan bakar dan energi alternatif. Capaian makro peningkatan sumberdaya air terlihat dari peningkatan areal irigasi teknis 29,5% tahun 2006 menjadi 59,4% tahun 2008. Untuk capaian peningkatan sarana prasarana jalan diperlihatkan dengan rasio aksesibilitas daerah 0,62 km/km² tahun 2006 menjadi 0,63 km/km² tahun 2008, tingkat kemantapan kondisi jalan dan jembatan dari 68,50% menjadi 78,20%, rasio elektrifikasi dari 58,7% menjadi 63,7 %.

Pembangunan prasarana perumahan dan permukiman menunjukkan peningkatan lingkungan siap bangun dari 24 Ha menjadi 60 Ha, cakupan pelayanan air bersih dari 42% menjadi 60% dan kondisi rumah tidak layak huni dari 15% menjadi 13%. Sementara cakupan daerah pelayanan listrik menunjukan peningkatan sebesar 88,94% dari menjadi 89,6% serta rasio elektrifikasi dari 58,7% menjadi 63,7%.

f. Agenda Mempercepat Penurunan Tingkat Kemiskinan

Menurunnya penduduk miskin dari 12,51% pada tahun 2006 menjadi 10,67% di tahun 2008, dan pada tahun 2009 diperkirakan akan menjadi 9,54%.

Dalam jangka pendek, prioritas penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk menjaga stabilitas kehidupan masyarakat miskin akan jebakan kemiskinan "*poverty trap*" yang dapat bergeser bila kondisi makro ekonomi dalam keadaan labil.

Dimana sedikit saja terjadi gejolak ekonomi makro, akan berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat miskin. Program ini juga diarahkan untuk menciptakan kondisi kondusif terhadap perbaikan jangka panjang.

Pemerintah merespon keadaan tersebut dalam empat wilayah penting: (a) menyediakan jaminan pangan; (b) membantu daya beli masyarakat miskin dengan menciptakan lapangan kerja; (c) menyediakan akses terhadap pelayanan sosial, seperti kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat miskin; (d) menjaga kegiatan ekonomi daerah dengan pemberian hibah (*block grant*) kepada daerah dan pemberian pinjaman. Salah satunya dikenal dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM).

g. Agenda Memberdayakan Nagari Sebagai Basis Pembangunan

Menguatnya kelembagaan pemerintahan nagari sebesar 58%, penguatan kapasitas aparatur pemerintahan nagari sebesar 45%, pendataan administrasi, keuangan dan aset nagari sebesar 46% serta lembaga keuangan nagari sebesar 99%.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2006-2010, Program Pemberdayaan Pemerintahan Nagari yang dilakukan pada tahun 2007-2008 tertuju pada aspek peningkatan kelembagaan pemerintah nagari, dan masih tertinggal dalam usaha peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan sumberdaya manusia

yang terkait dalam pemerintahan nagari. Sasaran utama program yang telah dilaksanakan adalah untuk mendorong terlaksananya pemerintahan nagari secara lebih baik sesuai dengan kebudayaan minangkabau. Program yang mendorong rasa kebersamaan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses menjadikan nagari sebagai basis pembangunan di nagari bersangkutan masih perlu lebih dikembangkan untuk masa datang.

Dengan demikian, untuk sisa periode RPJM 2006-2010 sebaiknya program dan kegiatan pembangunan daerah lebih banyak diarahkan pada upaya untuk melakukan penataan kewenangan pemerintahan nagari sesuai dengan prinsip otonomi daerah, pendataan aset nagari, dan keterpaduan pembangunan sosial, politik dan ekonomi

2. Berkenaan dengan penjelasan tentang gambaran menyeluruh dalam bentuk planning terhadap pemulihan pasca bencana yang dapat memberikan makna terhadap kontribusi APBD dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan data hasil perhitungan kerusakan dan kerugian menurut kepemilikan, kerusakan dan kerugian sebagian besar merupakan milik swasta dan sub sektor terbesar yang mengalami kerugian adalah sektor infrastruktur, terutama kerusakan pada perumahan dan sarana air minum dan sanitasi.

- b. Untuk pemulihan infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor diperlukan anggaran sebesar 6,417 triliun yang bersumber dari dana Donor, APBN, APBD dan masyarakat.
 - c. Dana APBD untuk pemulihan belum signifikan karena keterbatasan anggaran APBD, karena itu pada tahap tanggap darurat dana yang ada diprioritaskan untuk kegiatan pemulihan prasarana dasar meliputi aksesibilitas ke lokasi bencana, penyediaan tenda, air bersih dan listrik, pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Sedangkan untuk tahap early recovery/pemulihan dini, dana yang terbatas tersebut diprioritaskan untuk pembangunan hunian sementara, pembangunan ruang kelas dan fasilitas kesehatan sementara, kegiatan ekonomi produktif serta pendampingan/klinik rehabilitasi dan rekonstruksi seluruh sektor.
3. Menanggapi pertanyaan tentang perlunya gambaran yang jelas berkaitan dengan sharing biaya pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah serentak antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi, sehingga tidak menimbulkan masalah nantinya, dapat dijelaskan bahwa untuk Pemilu Kepala Daerah serentak pada 13 Kabupaten/Kota dan Provinsi pada tanggal 16 Juni 2010 belum ada kesepakatan karena sedang menunggu aturan dari Departemen Dalam Negeri tentang pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah, karena bila disamakan dengan standar belanja Pemilihan Presiden akan sangat memberatkan daerah, sejalan dengan itu Provinsi

sedang melakukan rapat-rapat persiapan, namun Pemerintah Provinsi merencanakan :

- a. Pada APBD tahun 2010 disediakan dana sebesar Rp.30 milyar untuk pemilihan Gubernur.
- b. Untuk pemilihan Bupati dan Walikota diharapkan dibiayai oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota melalui APBD masing-masing.
- c. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan pemilihan Bupati/Walikota, mereka juga diharapkan berpartisipasi dalam menyeleggarakan Pilkada Gubernur dengan menganggarkan pula di APBD sesuai pasal 8 Permendagri No. 44 Tahun 2007.
- d. Pemerintah provinsi juga akan membantu anggaran untuk pendistribusian kotak suara dan lain-lain, tergantung kesepakatannya.

Dengan demikian bagi daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan Bupati/Walikota, cukup satu kali saja menganggarkan biaya pemilu. Sebab pelaksanaan pemilihan Gubernur dengan pemilihan Bupati/Walikota dilaksanakan pada hari yang sama.

4. Menanggapi pernyataan bahwa Fraksi Demokrat setuju anggaran fungsi pendidikan sebesar 15,78% dinaikkan menjadi 20% sehingga dapat membiayai seluruh sarana dan prasarana pendidikan, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah mempunyai komitmen bahwa untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang berhubungan

dengan peningkatan pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan, mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.07/2009 tentang Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD, yakni alokasi anggaran fungsi pendidikan ditetapkan sekurang-sekurangnya 20%. Namun karena keterbatasan kemampuan keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi secara bertahap telah mengupayakan peningkatan pengalokasian belanja fungsi pendidikan, dari tahun lalu sebesar 13,42% menjadi 15,78% tahun 2010.

- b. Untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, dari tahun 2006 sampai tahun 2009 antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota bersama-sama dengan Legislatif telah sepakat untuk melaksanakan sharing pembiayaan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama, dengan komposisi sharing pembiayaan 60% Pusat, 20% Provinsi dan 20% Kab/Kota. Komponen yang disepakati meliputi rehabilitasi ruang kelas, peningkatan kualitas guru, pembangunan sekolah baru dan penuntasan buta huruf/aksara.
- c. Selain itu, pada Rancangan APBD tahun 2010 telah dialokasikan program rehabilitasi dan pembangunan sekolah baru pada daerah pasca gempa

Sedangkan berkaitan dengan pasca bencana gempa tanggal 30 September 2009 kita telah mendapatkan berbagai bantuan dari

berbagai pihak, baik pihak Luar Negeri, LSM dan lembaga-lembaga lainnya yang peduli terhadap pendidikan. Namun demikian karena kebutuhan perbaikan memang banyak, maka dilakukan penyisiran kembali usulan KUA dan PPAS yang telah diajukan, yang akan diperuntukan bagi rekonstruksi Sarana dan Prasarana pendidikan. Kita juga telah mengajukan kepada Pemerintah Pusat kiranya di tahun 2010 rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan dapat kita selesaikan. Dan diharapkan pemerintah Kabupaten/Kota berbuat hal yang sama, sehingga percepatan rekonstruksi ini dapat kita lakukan.

Terhadap himbauan perlunya menjadi perhatian bersama para orang tua dan guru serta pihak-pihak berkompeten, untuk dapat melakukan pengawasan terhadap keluarga, anak didik dan masyarakat, agar jangan sampai terjadi perbuatan yang mengarah pada penggunaan obat-obat terlarang, kami memberikan apresiasi dan sangat mendukung atas saran dan masukan tersebut.

Kekhawatiran terhadap keterlibatan generasi muda kita dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, sebagaimana yang kita lihat di media massa, khususnya televisi sangat wajar dan merupakan kekhawatiran kita semua. Karena telah merambah pada sebagian besar masyarakat, bahkan sampai pada kelompok usia produktif (usia muda) khususnya yang masih berstatus pelajar dan mahasiswa. Hal ini tentu akan sangat mengancam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena tidak

saja mengakibatkan hilangnya suatu generasi (lost generation) tetapi juga dapat meruntuhkan ketahanan nasional Negara kita.

Menghadapi kejahatan narkoba bukan perkara mudah, kita sudah dihadapkan dengan sesuatu yang terorganisir (organizational crime), sehingga permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bersifat multidimensional harus ditangani secara komprehensif, konseptual, dan terintegrasi. Tidak saja dilingkungan lembaga-lembaga pemerintahan tetapi juga melibatkan masyarakat luas. Oleh sebab itu, kedepan seharusnya upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut harus secara lebih sistemik.

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengantisipasi bahaya narkoba dan pemakaian obat-obat terlarang dikalangan pelajar antara lain dengan :

- a. Melakukan pelatihan maupun penyuluhan, serta koordinasi dengan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
- b. Melalui integrasi pada mata pelajaran yang relevan, seperti mata pelajaran agama, kimia dan mata pelajaran lainnya.
- c. Pembentukan forum anak daerah di 19 kab/kota yang bertujuan untuk saling tukar informasi tentang pembinaan dan pendidikan anak;
- d. Melaksanakan kegiatan sosialisasi bahaya NAPZA bagi kesehatan reproduksi setiap tahunnya;

- e. Telah melaksanakan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) dalam rangka mencerdaskan generasi muda dan anak yang berkualitas;
5. Berkaitan dengan permintaan agar Pemerintah mendorong sektor riil, sehingga roda perekonomian dapat berjalan lebih dinamis untuk dapat memacu pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja dalam rangka mengurangi angka pengangguran, dapat kami sampaikan bahwa gempa 30 September 2009 telah membawa dampak yang kurang baik bagi pelaku ekonomi daerah, karena terjadinya kerusakan sarana dan prasarana usaha serta stock produksi. Untuk pemulihan ekonomi dimaksud berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya dengan membangun sarana penampungan dalam usaha perdagangan.

Selanjutnya perbankan juga telah memberikan kesiapannya untuk membantu debitur yang usahanya macet karena gempa dengan memperhatikan tingkat kerusakan yang dialami, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/15/PBI/2006 tentang perlakuan khusus terhadap kredit Bank bagi daerah-daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam.

Selanjutnya Pemerintah Daerah akan selalu berkomitmen untuk mengembangkan usaha kecil, menengah dan Koperasi dalam bentuk permodalan melalui pengalokasian dana bergulir APBN/APBD, peningkatan skill melalui berbagai macam pendidikan dan pelatihan serta pemasaran melalui pelaksanaan expo di dalam dan luar negeri.

Dalam rangka pemulihan sektor perekonomian pasca gempa, khususnya untuk Koperasi dan UKM di Sumatera Barat, telah diusulkan program bantuan modal kerja untuk PKL yang telah diregistrasi yang tergabung dalam wadah koperasi sebanyak 1000 PKL. Disamping itu juga diusulkan beberapa program lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas dan pembangunan UKM seperti :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional.
- b. Pendidikan dan pelatihan bagi Pengurus koperasi dan UKM
- c. Mengikut sertakan koperasi komoditi dan UKM potensial dan berbagai event promosi dan pemasaran ditingkat Nasional.

6. Sehubungan dengan penjelasan mengenai tidak terlihatnya stimulus peningkatan produksi pertanian dalam arti luas di Kabupaten/kota yang tidak kena bencana untuk menjamin swasembada dan menjaga market share supply untuk provinsi tetangga berupa beras, sayur, ayam, daging dan ikan dapat dijelaskan bahwa pemerintah provinsi telah mengupayakan mengalokasannya dalam program/kegiatan di masing-masing SKPD terkait, seperti :

- a. Komoditi beras dan sayuran melalui kegiatan pengembangan intensifikasi melalui teknologi PTS untuk beras/padi, peningkatan produksi dan perbaikan mutu sayuran melalui teknologi pertanian organik di daerah dataran rendah dan dataran tinggi, secara keseluruhan juga diupayakan melalui kegiatan peningkatan kualitas dan ketersediaan benih/bibit, ketersediaan dan pengawasan pupuk dan pestisida, kegiatan pendukung lainnya berupa peningkatan kualitas SDM petani melalui pendidikan dan

pelatihan (sekolah lapang), serta perbaikan kualitas panen dan pasca panen.

- b. Untuk komoditi ayam, daging dan ikan juga diupayakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain ; optimalisasi produksi semen beku (BIB), untuk ternak sapi, peningkatan produksi ternak dan unggas lainnya melalui peningkatan produksi serta pembinaan untuk pakan ternak, dan termasuk juga peningkatan pembinaan terhadap petani nelayan melalui perbaikan mutu benih ikan, pemberdayaan nelayan tangkap dan sebagainya.

Sedangkan perhatian pemerintah untuk revitalisasi perkebunan, pengembangan ikan tuna dan industry pengolahan coklat dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah telah melakukan revitalisasi melalui :

- a. Penyaluran kredit program revitalisasi pertanian/perkebunan yang diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 dan Pedoman Umum yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian dengan persyaratan antara lain yaitu :
 - Adanya petani peserta program revitalisasi perkebunan yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota setempat.
 - Adanya Agunan berupa sertifikat hak milik atas nama petani peserta.

Dalam pelaksanaan program revitalisasi perkebunan permasalahan yang sering ditemui tidak adanya sertifikat hak milik atas nama petani peserta yang disebabkan oleh beberapa hal seperti; tidak tersedianya biaya untuk mensertifikatkan tanah,

adanya pemangku ulayat yang kurang setuju untuk mensertifikatkan tanah atas nama petani peserta, status lahan yang terkait dengan fungsi kawasan hutan.

Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan langka-langkah antara lain yaitu:

- Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk menyediakan dana talangan dan melakukan pendekatan dengan ninik mamak setempat dalam mengatasi permasalahan sertifikat lahan.
- Mendorong Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Besar berperan aktif sebagai Mitra Usaha program revitalisasi perkebunan.
- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara menyeluruh dalam pelaksanaan program revitalisasi perkebunan antar instansi terkait (Pemprov, Pemda Kab/Kota, BPN, Dinas Kehutanan, Bank Pelaksana serta Mitra Usaha).

Pada saat ini sedang diproses pencairan kredit revitalisasi pengembangan perkebunan kelapa sawit seluas 5.261 Ha, dengan Mitra Usaha PT. Inkud Agritama di Kab. Pasaman Barat seluas 3.500 Ha dan Kab. Agam 1.000 Ha serta PT. Incasi Raya di Kabupaten Pesisir Selatan seluas 761 Ha. Disamping itu telah diajukan pula penetapan calon Mitra Usaha PT. Inkud Agritama ke Ditjenbun untuk pengembangan revitalisasi perkebunan

kelapa sawit seluas 6.000 Ha yang bekerjasama dengan 5 (lima) koperasi di Kabupaten Solok Selatan.

- b. Sedangkan revitalisasi pada industri pengolahan kakao telah diatur melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 tahun 2006 bahwa kakao yang dihasilkan adalah kakao fermentasi. untuk menciptakan kakao yang fermentasi ini dilakukan proses pemeraman dengan menggunakan kotak fermentasi, hingga didapatkan biji kering yang aromanya khas dan dapat disimpan dalam jangka waktu lama dan fermentasi ini merupakan ukuran standar mutu kakao.

Selanjutnya pengolahan kakao ditingkat petani dibantu alat pengolahan kakao sampai menghasilkan bubuk dan pasta. Saat ini tempat industri pengolahan kakao di Sumatera Barat terdapat di :

- Kabupaten Padang Pariaman lokasinya di Sikukur.
- Kabupaten Agam lokasinya Sungai Jaring.
- Kabupaten Pasaman lokasinya Simpati (Simpang alahan mati).

Berkenaan dengan saran agar dalam tahun anggaran 2010 pekerjaan-pekerjaan fisik dan non dikerjakan sesuai dengan rencana, jangan sampai terulang kembali pekerjaan-pekerjaan dikerjakan pada akhir tahun, hal ini tentu menjadi perhatian kita bersama.

7. Menanggapi saran agar pemerintah daerah lebih memprioritaskan masalah kesehatan akibat bencana gempa dan kekurangan sarana dan prasarana kesehatan jangan dijadikan alasan untuk tidak memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Pemerintah Provinsi mempunyai komitmen bahwa untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang berhubungan dengan peningkatan pemenuhan pelayanan dasar bidang kesehatan merupakan prioritas.
 - b. Pada masa tanggap darurat, pelayanan kesehatan dilakukan melalui posko kesehatan di daerah yang sarana kesehatannya rusak. Sedangkan pendistribusian obat-obatan diberikan oleh Dinkes Kab/Kota, Provinsi maupun dari Departemen Kesehatan serta bantuan dari berbagai donor, sehingga kebutuhan obat-obatan untuk pelayanan tersedia dalam jumlah yang cukup.
 - c. Untuk pelayanan kesehatan masyarakat pasca tanggap darurat pelayanan kesehatan diberikan di tenda darurat pada sarana kesehatan yang rusak, Sementara untuk obat-obatan apabila terjadi kekurangan di sarana kesehatan dapat dimintakan ke Dinkes Kab/ Kota, maupun ke Provinsi.
 - d. Untuk peningkatan mutu pelayanan dan SDM Rumah Sakit dilakukan melalui peningkatan pendidikan formal terhadap beberapa orang tenaga spesialis melalui dana APBD Propinsi, HWS dan Dana Dekon. Disamping itu dilakukan juga pelatihan terhadap petugas serta penambahan fasilitas rumah sakit secara bertahap untuk mendukung pelayanan kesehatan. Namun

demikian masih perlu masukan dari berbagai pihak untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan di Rumah Sakit.

8. Berkenaan dengan tanggapan tentang perlunya sikap tegas Pemda sebagai owner BUMD, baik dalam memangkas birokrasi, peningkatan/peremajaan SDM maupun perhatian Pemerintah dari permodalan, sehingga diketahui BUMD yang akan dibesarkan dan dibubarkan, dapat disampaikan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap BUMD sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, diberikan dalam bentuk :
 - a. Penyampaian saran dan masukan untuk segala aspek operasionalisasi pada waktu RUPS.
 - b. Pembinaan lainnya di luar RUPS yang meliputi penyampaian surat tertentu sekiranya BUMD melakukan operasional tidak sesuai ketentuan. Diantara surat yang telah dikirimkan adalah kepada PT. Andalas Tuah Sakato, PT. Dinamika Sumbar Jaya, PT. Grafika Jaya Sumbar serta PT. Pembangunan Sumbar karena telah lalai dalam melakukan RUPS mempertanggungjawabkan operasionalisasi perusahaan tahun 2008.

Selanjutnya menyangkut saran agar penambahan modal kepada Bank Nagari tetap dialokasikan sebesar Rp.15 milyar dan untuk PT. Askrida tetap sebesar Rp.5 milyar sesuai dengan KUA dan PPAS. Kami sependapat, namun pada pembahasan bersama Badan Anggaran ditetapkan hanya untuk Bank Nagari saja sebesar Rp.5 milyar. Akan tetapi bila Anggota Dewan mengharapkan kembali seperti yang direncanakan semula, kami setuju dan hal ini perlu

dibicarakan lagi pada tahap pembahasan berikutnya, tentunya penambahan ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Demikian jawaban kami atas pertanyaan, tanggapan dan saran yang disampaikan oleh Fraksi Partai Ukhuwah, semoga dapat menerima dan memakluminya

B. JAWABAN ATAS TANGGAPAN, PERTANYAAN, USUL DAN SARAN DARI FRAKSI PARTAI UKHUWAH

1. Menanggapi pertanyaan mengenai apakah dana hibah dari PT. Rajawali juga merupakan sumber pendapatan untuk membiayai belanja daerah dapat disampaikan bahwa dana PT. Rajawali merupakan dana hibah yang diberikan oleh PT. Rajawali sesuai dengan MoU dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan dana tersebut telah disepakati untuk dijadikan sebagai Dana Abadi yang disimpan pada Kas Daerah Khusus pada PT. Bank Nagari. Sedangkan jasa giro yang diperoleh dari penyimpanan dana tersebut pada PT. Bank Nagari merupakan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang pengalokasian belanjanya merupakan belanja hibah yang diberikan kepada Yayasan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Daerah 10 Nomor Tahun 2009 tentang Yayasan Bea Siswa Minangkabau
2. Sehubungan dengan saran supaya 3 Perusahaan Daerah diprivatisasi saja agar tidak memberatkan keuangan daerah setiap tahun, dapat dijelaskan bahwa apabila dibandingkan dengan modal yang disetorkan, kontribusi sebesar Rp.482,9 juta lebih kepada PAD memang dirasakan kurang sebanding, namun demikian ketiga perusahaan daerah ini adalah perusahaan yang baru mulai pulih dari kegiatan usahanya pasca krisis ekonomi. Kita bersyukur bahwa pada tahun 2008 untuk ketiga perusahaan daerah ini sudah mulai memberi keuntungan dimana sebelumnya terus mengalami kerugian. Disamping itu perusahaan ini juga telah memberikan

kontribusi pada perekonomian daerah dalam bentuk penyerapan tenaga kerja

3. Mengenai sejauhmana langkah persiapan yang dilakukan oleh Pemda termasuk pembenahan daftar pemilih yang tidak akurat, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah daerah melalui Forum Komunikasi seluruh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota, melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan secara rutin 1 kali dalam 1 bulan, selalu mengajak untuk tetap melakukan pemutakhiran data penduduk melalui pelayanan administrasi kependudukan berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Pada Forum ini, juga secara berkala dihimpun data kependudukan dari seluruh Kab/Kota sebagai dasar pembuatan Data Agregat Kependudukan Sumatera Barat ;
 - b. Selanjutnya, menyangkut ketersediaan data penduduk untuk kebutuhan Pemilu Kepala Daerah diminta kepada seluruh Pemerintah dan KPU Prov. Dan Kab./ Kota agar mempedomani Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pasal 70 ayat 1 dan 2, serta pasal 73 dan 74 yang menyatakan bahwa :
 - Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 lalu, dan ditambahkan dengan data pemilih tambahan dijadikan dasar dalam penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada atau Pemilu Kepala Daerah oleh KPU Prov. Dan Kab/Kota. Selanjutnya, PPS (Panita Pemungutan Suara)

menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS);

- Untuk menjaga akurasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT), disarankan kepada KPU Kab/Kota untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Sebagaimana surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 470/1238/Duk/Pemduk-2009 tanggal 29 September 2009 perihal Daftar Pemilih untuk Pilkada Serentak Tahun 2009;

- c. Tindaklanjut surat Gubernur diatas, pada tanggal 30 September 2009 telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se Sumatera Barat, yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan diantaranya adalah seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan bantuan secara Proporsional, terutama membantu memberikan data kependudukan sebagai salahsatu sumber data dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kab/Kota. Selanjutnya, hasil rumusan ini disampaikan kepada seluruh Bupati/Walikota sebagai tindaklanjut melalui surat Sekretaris Daerah Nomor 470/1281/Pemduk-2009 tanggal 16 Oktober 2009 perihal Hasil Rumusan Rapat Koordinasi Penyelenggara dan Pelaksana Adm. Kependudukan Kab/Kota se Sumatera Barat. Pemerintah daerah melalui Forum Komunikasi seluruh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota, melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan secara rutin

1 kali dalam 1 bulan, selalu mengajak untuk tetap melakukan pemutakhiran data penduduk melalui pelayanan administrasi kependudukan berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Pada Forum ini, juga secara berkala dihimpun data kependudukan dari seluruh Kab/Kota sebagai dasar pembuatan Data Agregat Kependudukan Sumatera Barat ;

d. Selanjutnya, menyangkut ketersediaan data penduduk untuk kebutuhan Pemilu Kepala Daerah diminta kepada seluruh Pemerintah dan KPU Prov. Dan Kab./ Kota agar mempedomani Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pasal 70 ayat 1 dan 2, serta pasal 73 dan 74 yang menyatakan bahwa :

- Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 lalu, dan ditambahkan dengan data pemilih tambahan dijadikan dasar dalam penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada atau Pemilu Kepala Daerah oleh KPU Prov. Dan Kab/Kota. Selanjutnya, PPS (Panita Pemungutan Suara) menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- Untuk menjaga akurasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT), disarankan kepada KPU Kab/Kota untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Sebagaimana surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 470/1238/Duk/Pemduk-2009 tanggal 29 September 2009 perihal Daftar Pemilih untuk Pilkada Serentak Tahun 2009;

Tindaklanjut surat Gubernur diatas, pada tanggal 30 September 2009 telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se Sumatera Barat, yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan diantaranya adalah seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan bantuan secara Proporsional, terutama membantu memberikan data kependudukan sebagai salahsatu sumber data dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kab/Kota. Selanjutnya, hasil rumusan ini disampaikan kepada seluruh Bupati/Walikota sebagai tindaklanjut melalui surat Sekretaris Daerah Nomor 470/1281/Pemduk-2009 tanggal 16 Oktober 2009 perihal Hasil Rumusan Rapat Koordinasi Penyelenggara dan Pelaksana Adm. Kependudukan Kab/Kota se Sumatera Barat.

4. Berkenaan dengan pertanyaan tentang sejauhmana langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akses layanan dan kualitas kesehatan bagi masyarakat miskin terutama pada Daerah-daerah Pasca Bencana dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Untuk masyarakat miskin pemerintah telah mengeluarkan Program Jamkesmas dimana Kuota Sumatera Barat untuk tahun ini sebanyak 1.361.281 jiwa untuk 19 kabupaten/ Kota, dengan jumlah penduduk Sumatera Barat berdasarkan data BPS sebanyak 4.869.620 jiwa. Bagi masyarakat miskin yang tidak

tertampung dalam kuota Jamkesmas telah pula mengeluarkan Program Jamkesda dengan dana sharing antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota dengan rincian :

Tahun 2007 Rp.3.523.560.000,- untuk 62.876 jiwa

Tahun 2008 Rp.5.612.880.000,- untuk 50.924 jiwa

Tahun 2009 Rp.3.318.293.800,- untuk 146.281 jiwa

Tahun 2010 direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000,-

Sementara untuk masyarakat miskin akibat bencana gempa, sudah dibuat Surat Edaran ke Dinas Kesehatan Kab/ Kota agar segera mendata masyarakatnya untuk dimasukkan ke dalam peserta Jamkesmas

5. Menanggapi pendapat bahwa yang paling penting dalam mengevaluasi dan mereview capaian tingkat pendapatan dan belanja adalah output yang dihasilkan dari belanja yang dikeluarkan, kami sependapat dan hal ini telah dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran melalui penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), yang substansinya melaporkan capaian kinerja berdasarkan input, output, outcome, benefit serta dampak dari suatu program dan kegiatan. Disamping itu dalam menyusun prioritas pembangunan yang dituangkan dalam rencana pembangunan tahunan atau RKPD dan dijabarkan dalam KUA dan PPAS memuat evaluasi program pembangunan tahun sebelumnya sebagai pertimbangan dalam alokasi program dan kegiatan.

6. Menjawab pertanyaan tentang berapa angka pertumbuhan ekonomi yang paling tepat ditetapkan untuk Tahun 2010 agar penduduk miskin dan pengangguran menurun dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2010 diperkirakan akan mencapai 5,66% yang didorong oleh sektor pertanian, industri pengolahan dan sektor jasa-jasa. Peningkatan laju pertumbuhan tersebut juga didorong oleh penciptaan nilai investasi yang diperkirakan tumbuh 3,16%.
- b. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 10,44% dari jumlah penduduk yang diperkirakan akan mencapai 4,869 juta jiwa pada tahun 2010 dengan laju pertumbuhan penduduk antara tahun 2005-2010 diperkirakan berada pada kisaran 0,6 %.
- c. Disamping itu upaya untuk menstabilkan ketahanan pangan diperkirakan akan menjaga laju inflasi pada kisaran 8,0-9,0% terutama untuk laju inflasi yang disebabkan oleh kelompok bahan makanan.

Disamping itu untuk menekan jumlah penduduk miskin dan penurunan angka pengangguran, diupayakan melalui :

- a. Program/kegiatan penanganan kemiskinan dan pengangguran.
- b. Program/kegiatan dukungan perbaikan sarana dan prasarana jalan dan infrastruktur.
- c. Pelatihan kewirausahaan mandiri (PKM).
- d. Diupayakan prioritasnya pada kegiatan-kegiatan padat karya.

7. Menanggapi saran agar program yang tertuang dalam Rancangan APBD Tahun 2010 hendaknya disesuaikan dengan kondisi obyektif saat ini, sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian, asumsi dan pencapaian pertumbuhan ekonomi, dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian asumsi dan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang semula dalam RPJM ditetapkan sebesar 6.9% di turunkan menjadi 5,66%.

Dengan asumsi berdasarkan kondisi eksternal dan internal, maka kondisi eksternal yang mempengaruhi adalah sebagai berikut :

- a. Laju pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2010, diperkirakan sebesar 5,66% yang didorong oleh meningkatnya investasi dan pertumbuhan volume dan harga ekspor komoditi non migas dan upaya pemerintah mengurangi ekonomi biaya tinggi sehingga diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perekonomian riil.
- b. Berbagai kegiatan pembangunan yang diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran.

Dengan demikian jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi 12 – 13,5 % pada tahun 2010 dan pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi 8,00% dari angkatan kerja pada tahun 2010. Sementara itu membaiknya iklim ketenagakerjaan akan meningkatkan kembali penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas pada berbagai sektor ekonomi.

Sedangkan kondisi internal yang mempengaruhi APBD tahun 2010 adalah:

- a. Besarnya alokasi anggaran untuk program rekonstruksi dan rehabilitasi terutama untuk rekonstruksi prasarana dan sarana pemerintah, sehingga alokasi anggaran lebih besar untuk pengeluaran rutin belanja pemerintah, dibandingkan dengan pengeluaran untuk pembangunan yang dapat menggerakkan sektor riil, sehingga pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi baru dirasakan dalam jangka panjang, akibatnya pemulihan ekonomi di tahun 2010 belum sepenuhnya dapat pulih yang ditandai dengan masih melambatnya pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan hanya mencapai 5,66%.
 - b. Jenis pendapatan daerah yang selama ini didominasi oleh sektor pajak dan retribusi daerah, diperkirakan akan mengalami penurunan karena banyaknya hotel dan restoran yang mengalami kerusakan akibat gempa, tetapi apabila dapat diimbangi oleh jenis pendapatan daerah lainnya seperti dana perimbangan dan dana darurat bahkan dana bantuan hibah untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa, maka perbaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2010 akan dapat dilakukan.
8. Mengenai alokasi dana pendidikan pada tahun 2010 seharusnya sudah 20%, hal ini telah dijelaskan pada pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat
 9. Menjawab pertanyaan mengenai Pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD apakah bisa dicapai sehingga tidak mengganggu belanja yang sudah dianggarkan, dapat dijelaskan bahwa target

pendapatan yang dituangkan dalam Rancangan APBD Tahun 2010 sudah merupakan hasil kajian yang mendalam dan terukur, baik melalui pihak-pihak independen maupun SKPD pemungut.

Pada Tahun Anggaran 2009 ini dari target pendapatan setelah perubahan sebesar Rp.1.543.438.625.781,- telah terealisasi s/d bulan November sebesar Rp.1.422.964.581.053 atau 92,19% dan diperkirakan s/d akhir desember 2009 diperkirakan dapat direalisasi 100%

10. Menjawab pertanyaan tentang sasaran dan kebijakan tahun 2010 dalam peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada daerah gempa dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Revitalisasi pertanian dan pengembangan agroindustri, diarahkan pada pengembangan agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan. Peningkatan ketahanan pangan sebagai suatu sistem bertumpu kepada empat pilar, yaitu produksi, konsumsi, distribusi, dan penunjang seperti kelembagaan.
 - b. Pengembangan dan perluasan ekspor daerah dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan nilai ekspor daerah dari 12,7% pada tahun 2006 dan rata-rata sebesar 14,5% pada tahun 2007-2008, meningkatnya peran ekspor dalam perekonomian daerah sekitar 15,0%, meningkatnya diversifikasi komoditas dan negara yang menjadi pasar ekspor, meningkatnya peran ekspor produk manufaktur baik dalam produksi manufaktur daerah maupun dalam total ekspor daerah serta meningkatnya efisiensi dan

efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga dan kepastian berusaha untuk mewujudkan perdagangan dalam negeri yang kondusif dan dinamis.

- c. Pengembangan industri dan pariwisata yang diwujudkan dalam beberapa program yaitu: program peningkatan iklim usaha industri manufaktur, program peningkatan kemampuan teknologi industri, program penataan struktur dan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, program peningkatan keterampilan tenaga kerja serta program pengembangan dan perluasan akses industri kecil menengah dan manufaktur. Sedangkan Untuk sektor pariwisata belum mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan, karena masih bersifat parsial, dan belum terwujudnya pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap program dan kegiatan yang ada.
- d. Pengembangan kelembagaan ekonomi, koperasi dan UKM, merupakan salah satu bahagian dari upaya untuk mewujudkan kegiatan ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, karena koperasi dan UKM merupakan sektor strategis dalam mewujudkan kegiatan ekonomi rakyat. Disamping itu, koperasi dan UKM juga mempunyai peranan sangat penting dalam peningkatan penyediaan lapangan kerja serta penanggulangan kemiskinan dalam masyarakat. Setelah tiga tahun berjalan kondisi pada tahun 2008 terlihat bahwa lebih dari 95% industri di Sumatera Barat masih merupakan industri kecil yang tersebar di seluruh daerah, yang menyerap tenaga kerja sangat signifikan

sebesar 86%, dari seluruh tenaga kerja di sektor industri, dan untuk industri menengah dan besar hanya menyerap sekitar 14%. Usaha industri kecil yang jumlahnya sangat banyak ini merupakan suatu potensi yang dapat berperan lebih besar untuk menggerakkan perekonomian daerah.

- e. Peningkatan investasi dan pengembangan kerjasama regional & antar daerah jika dibandingkan dengan tahun 2006, upaya untuk menarik investasi asing menunjukkan kinerja yang sangat pesat. Terjadi pertumbuhan rencana PMA hingga 90,9% yaitu dari US\$ 64,7 juta menjadi US\$ 123,5. Meskipun masih berada dibawah pertumbuhan PMA Sumatera yang mencapai 220,7% dan pertumbuhan nasional sebesar 156,9%, kinerja Sumatera Barat lebih baik daripada Jambi dan Sumatera Utara yang justru mengalami penurunan dalam menarik investasi asing.
- f. Revitalisasi dan peningkatan pengelolaan BUMD menuju era global/perdagangan bebas, diperlukan langkah-langkah antisipasi bersifat strategis. Pengelolaan yang selama bernaung di bawah kendali birokrasi secara bertahap dilakukan perubahan dengan melakukan pengelolaan yang bersifat strategis dan profesional, dengan harapan adanya nilai tambah dan kemandirian bagi peran manajemen BUMD. Pemerintah Daerah selaku pemilik telah melakukan upaya perubahan bentuk hukum terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu salah satunya dengan merubah status Bank Nagari menjadi Perseroan Terbatas (PT).

g. Melaksanakan strategi pembangunan ekonomi daerah yang mampu memulihkan dan mengembangkan perdagangan, hotel dan restoran pasca gempa untuk menciptakan kesempatan kerja sekaligus menurunkan angka kemiskinan, melalui peningkatan kerjasama regional, nasional dan internasional.

11. Mengenai saran agar alokasi dana yang telah dianggarkan, baik dari APBN maupun APBD betul-betul dapat dinikmati oleh masyarakat dan perlu disiasati agar tidak terjadi *capital flight*, kami sependapat dan saran tersebut telah ditindaklanjuti dengan mengupayakan keterlibatan masyarakat melalui peningkatan produksi (output) daerah antara lain:

- a. Kegiatan peningkatan sector ekonomi produktif dengan pelaksanaan kegiatan stimulus yang diharapkan akan menghidupkan kembali perekonomian masyarakat, misalnya melalui kegiatan pematangan lahan, perbaikan saluran irigasi, bantuan bibit, pupuk, benih, perbaikan kolam ikan, perbaikan kandang, pembangunan tempat usaha sementara (pasar), bantuan modal usaha (UKM) dan bantuan peralatan (UKM).
- b. Pelaksanaan kegiatan peningkatan hasil produksi pertanian melalui kebijakan intensifikasi seperti padi tanam sabatang, pelaksanaan inseminasi buatan untuk ternak, dan ekstensifikasi seperti perluasan areal tanaman Kakao, Casia Vera, Sawit, Karet baik melalui perkebunan rakyat maupun perkebunan swasta, serta peningkatan produksi dan pemasaran perikanan tangkap dan budidaya. Pada saat ini kita telah melakukan

ekspor Tuna langsung dari bandara BIM ke Jepang via Singapore, yang selama ini ekspor dilakukan melalui Jakarta.

- c. Memperbanyak kegiatan yang bersifat swakelola, dan padat karya sehingga pengangguran dapat dikurangi, dan pendapatan masyarakat dapat meningkat yang akan meningkatkan terhadap peningkatan konsumsi masyarakat..
 - d. Penumbuhan kawasan sentra produksi berdasarkan komoditi unggulan pada daerah potensial. Saat ini kita telah memiliki 6 kawasan agropolitan dan 10 kawasan prima tani. Dan telah ditetapkan komoditi unggulan di daerah berdasarkan kesepatan antara propinsi dan kabupaten kota, yang diharapkan komoditi ini akan menjadi motor sebagai penggerak perekonomian daerah.
 - e. Pemerintah daerah juga mempunyai kebijakan penggunaan hasil kerajinan tenunan daerah dan bordiran untuk seragam pakaian dinas. Dengan adanya kebijakan ini maka industri tenunan dan sulaman telah semakin berkembang.
12. Berkaitan dengan pemandangan yang disampaikan bahwa pengalokasian dana SKPD-SKPD belum lagi proposional disebabkan kakunya penterjemahan terhadap urusan-urusan baik urusan wajib maupun pilihan dapat dijelaskan bahwa penyusunan rancangan APBD merupakan tahap akhir dari mekanisme perencanaan yang sudah disepakati dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas pada tahun anggaran berkenaan. Sesuai proses penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dimulai dengan Musrenbang

pada tingkat nagari, kabupaten/kota, dan provinsi. Prioritas yang akan diusulkan dalam musrenbang mengacu kepada prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Hasil dari sinkronisasi Musrenbang dari tingkat bawah sampai ke provinsi dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan selanjutnya dituangkan dalam KUA dan PPAS sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD.

13. Sehubungan dengan usulan agar Pemerintah Daerah dapat meningkatkan dan mempercepat penyelesaian infrastruktur untuk mengantisipasi bencana Tsunami dan Gempa, dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah telah merencanakan serta melaksanakan beberapa program dan kegiatan pembangunan infrastruktur baik infrastruktur fisik maupun infrastruktur non fisik, yang tujuannya selain untuk mengantisipasi bencana juga untuk pengurangan risiko bencana/disaster risk reduction. Bentuk kegiatan tersebut antara lain:

- a. Infrastruktur fisik

- Sejak tahun 2007 telah dimulai pembangunan jalan dan jembatan evakuasi tsunami di beberapa ruas jalan tertentu, dan telah dipasang peta informasi jalur evakuasi tsunami pada beberapa lokasi.

- Akan dibangun rumah penduduk yang konstruksinya tahan/aman gempa, dan pada pelaksanaannya akan didampingi oleh klinik rehabilitasi dan rekonstruksi
 - Bangunan fasilitas umum akan dibangun dengan struktur tahan gempa dan yang berada didekat pantai difungsikan sebagai shelter/tempat evakuasi tsunami bagi masyarakat sekitarnya.
- b. Infrastruktur non fisik
- Penyusunan Perda Provinsi Sumbar No. 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana/RPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 – 2012 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur No. 115 Tahun 2008.
 - Penyusunan Rencana Aksi Disaster Risk Reduction/ Pengurangan Risiko Bencana
 - Pelaksanaan berbagai Pelatihan, penyuluhan, workshop, diseminasi yang berkaitan dengan manajemen bencana
 - Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2009 – 2029 yang memasukkan unsur kerawanan bencana

Demikian jawaban kami atas pertanyaan, tanggapan dan saran yang disampaikan oleh Fraksi Partai Ukhuwah, semoga dapat menerima dan memaklumiya

C. JAWABAN ATAS TANGGAPAN, PERTANYAAN, USUL DAN SARAN DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR

1. Berkenaan dengan tanggapan bahwa berhubung tahun 2010 merupakan tahun terakhir jabatan Gubernur periode 2005 – 2010, maka semestinya Gubernur melakukan penyesuaian atau koreksi terhadap Target kinerja pembangunan daerah yang ada di dalam RPJMD tahun 2006-2010, agar nantinya tidak memberatkan didalam memberikan pertanggung jawaban diakhir masa jabatan dan apabila tidak tercapai target jangan dijadikan gempà sebagai alasan.

Terhadap perhatian tersebut kami mengucapkan terima kasih, dan kami selalu berupaya untuk menyesuaikan target-target yang awalnya ditetapkan dalam RPJMD melalui Perda Nomor 4 Tahun 2007, dimana didalam perjalanannya terdapat hal-hal yang tidak kita prediksi sewaktu menyusun RPJMD tersebut sebagai contoh terjadinya krisis keuangan global yang juga berdampak kepada daerah, kejadian gempa bulan Maret dan September 2007, gempa tanggal 30 September yang lalu dan lain sebagainya.

Penyesuaian tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan tahunan yaitu RKPD ataupun KUA. Sebagai contoh diantaranya yaitu Realisasi laju pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2006 sudah berada di atas target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 6,00% terealisasi menjadi 6,14%. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2008 yang tercantum di dalam RPJMD Sumatera Barat sebesar 6,60 % dilakukan koreksi menjadi 6,40% di dalam RKPD

tahun 2008, mengingat kondisi ekonomi global yang berdampak kepada perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah, begitupun dengan target dalam RPJMD tahun 2010 juga dilakukan koreksi dari 6,90 % menjadi sebesar 5,66 %.

Selanjutnya melakukan koreksi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin 9,54% pada tahun 2009 dari target RPJMD sebesar 10,44% dan dikoreksi dari target RPJMD sebesar 10,00% menjadi 9,00% pada tahun 2010.

2. Berkaitan dengan saran agar dana sumbangan PT. Rajawali yang merupakan dana abadi yang tidak akan dipergunakan untuk kegiatan lain selain untuk mendukung kegiatan yayasan pendidikan, agar dipisahkan dari kekayaan daerah atau dijadikan dana cadangan sehingga tidak meragukan bagi pengambil kebijakan untuk penggunaan dana tersebut, dapat kami jelaskan bahwa pada prinsipnya kami setuju dan sepakat dengan saran tersebut, namun untuk menempatkan dana tersebut sebagai dana cadangan prosesnya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (2) serta ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 ayat (2).

Kemudian tanggapan terhadap pemberian hibah atas bunga dana sumbangan PT. Rajawali kepada Yayasan Pendidikan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, dapat kami jelaskan bahwa hibah yang diberikan tersebut merupakan jasa giro yang

dihasilkan setiap tahun yang kemudian dihibahkan kepada Yayasan Pendidikan dan penempatannya sudah merupakan saran dari BPK.

3. Berkenaan dengan tanggapan terhadap klaim asuransi PT. Askrida atas kerusakan bangunan pemerintah daerah akibat bencana, perlu dihitung secara lebih akurat sesuai ketentuan dan mempedomani besarnya premi asuransi yang dibayarkan, dapat disampaikan bahwa PT. Askrida bersama-sama dengan pejabat terkait telah melakukan survey dan perhitungan terhadap bangunan / gedung-gedung Pemerintah Provinsi yang rusak akibat gempa tersebut. Berdasarkan survey dan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka PT. Asuransi Bangun Askrida Pusat dengan surat No. 0541/Dir/ABA-Kp/XI/2009 tanggal 26 November 2009 menyatakan bahwa besaran nilai penggantian kerugian masuk pada Kas Daerah sebesar Rp.75.000.000.000,- (Tujuh puluh lima milyar rupiah). Jumlah tersebut masih bersifat sementara, karena pihak PT. Asuransi Bangun Askrida masih melakukan penghitungan dan perlu data pendukung, khususnya untuk klaim gedung pemerintah yang rusak berat / ringan.
4. Berkaitan dengan alokasi dana untuk Bantuan Kredit Mikro Nagari sebesar lebih kurang Rp.28 milyar, sebelum disalurkan Pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap Kredit Mikro Nagari yang telah disalurkan sebelumnya. Evaluasi ini sangat diperlukan untuk melihat apakah betul-betul tepat sasaran serta bagaimana pertanggungjawaban kredit yang telah disalurkan tersebut dan bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah yang telah

menyalurkan bantuan Kredit Mikro Nagari ke daerah, namun daerah Kabupaten/Kota tidak menyediakan dana pendampingnya sebagaimana yang telah disepekati bersama, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan laporan yang disampaikan Daerah Kabupaten/Kota, dana yang disalurkan melalui Program Kredit Mikro Nagari telah disalurkan kepada rekening Pokja untuk diteruskan kepada kelompok penerima/pemanfaat (Penduduk Miskin) untuk pengembangan usaha seperti bordir, jualan/dagang, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain sebagainya, sesuai dengan potensi dan musyawarah yang dilakukan pada masing-masing nagari. Adapun jumlah kelompok penerima/pemanfaat Kredit Mikro Nagari sebanyak 6.910 kelompok dan penyaluran modal usaha bagi individu sebanyak 27.351 orang dari daerah Kabupaten/Kota pelaksana Program Kredit Mikro Nagari.
- b. Selain penyerapan tenaga kerja, program Kredit Mikro Nagari telah mampu mengurangi ketergantungan masyarakat miskin menggunakan jasa Rentenir.
- c. Berdasarkan hasil monitoring, masyarakat miskin (penerima program) menyambut positif keberadaan Program Kredit Mikro Nagari dan mengharapkan keberlanjutan Program Kredit Mikro Nagari, karena sangat membantu dalam penyediaan modal usaha.

- d. Sampai saat ini Bupati/Walikota (17 Kabupaten/Kota) telah menyatakan secara tertulis kesanggupannya membentuk Lembaga Pengelola Keuangan di tingkat Nagari, untuk mengelola dana Kredit Mikro Nagari beserta dana penanggulangan kemiskinan lainnya. Pada masa mendatang, diharapkan Lembaga Pengelola Keuangan di Nagari merupakan lembaga keuangan yang akan mengelola seluruh dana program penanggulangan kemiskinan di tingkat Nagari.
 - e. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 903/1015/DPKD/2009, tanggal 24 April 2009, telah disampaikan kepada Bupati dan Walikota se-Sumatera Barat tentang penyediaan dan pendistribusian dana Kredit Mikro Nagari, untuk segera disalurkan kepada penerima manfaat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan pada buku petunjuk teknis pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari.
 - f. Sesuai Juknis yang telah ditetapkan, bahwa dana KMN tidak dapat dicairkan apabila Daerah Kab/Kota tidak menyediakan dana sharing sebanyak yang telah dialokasikan dalam APBD Provinsi
5. Terhadap harapan agar dalam penyampaian Rancangan APBD, pemerintah daerah juga menyampaikan usulan program yang didanai APBN kepada DPRD sebagai bahan sandingan dalam pembahasan Rancangan APBD, akan disampaikan waktu pembahasan pada tingkat komisi oleh SKPD terkait.

6. Berkaitan dengan pertanyaan sampai sejauhmana pelaksanaan pilkada yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi serta bagaimana koordinasi dan sharing dana dengan Kabupaten/Kota, dapat kami jelaskan bahwa

Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan pembenahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), telah dijelaskan pada jawaban pertanyaan yang disampaikan oleh Fraksi Ukhuwah

7. Sehubungan dengan pertanyaan sejauh mana langkah-langkah yang telah diupayakan untuk mendapatkan dana stimulasi carbon yang dihasilkan oleh hutan lindung, karena pada tahun 2008 yang lalu Pemerintah Daerah merencanakan akan melakukan kerjasama dengan sebuah lembaga untuk mengupayakan adanya dana stimulasi dari negara-negara dunia untuk Carbon yang dihasilkan dari hutan lindung yang ada di Sumatera Barat guna membantu daerah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, dapat kami jelaskan bahwa kerjasama yang ditawarkan oleh Carbon Strategic Global (CSG) berkaitan dengan karbon kredit di Sumbar merupakan rencana kerjasama internasional untuk karbon kredit. Untuk terlaksananya kerjasama dimaksud terdapat beberapa ketentuan yang dipedomani antara lain :

- a. Permendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri, yang antara lain menyatakan bahwa sebelum Gubernur menandatangani perjanjian luar negeri diperlukan pertimbangan

dari Mendagri sebagai dasar dalam menyusun rencana kerjasama. Untuk itu Gubernur telah menyurati Menteri Dalam Negeri, namun sampai saat ini tanggapan dari Menteri Dalam Negeri belum ada.

- b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) disebutkan bahwa pelaku REDD adalah Entitas Nasional dan Entitas Internasional. Yang termasuk dalam Pelaku dari Entitas Nasional terdiri dari; Pemegang IUPHHK-HA, Pemegang IUPHHK-HT, Pemegang IUPHHK-HKM, Pemegang IUPHHK-HTR, Pemegang IUPHHK-RE, Kepala KPHP, Kepala KPHL, Kepala KPHK, Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumberdaya Alam atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, Pengelola Hutan Adat, Pemilik atau Pengelola Hutan Hak, Pengelola Hutan Desa.

Berdasarkan Permenhut tersebut diatas, dalam pelaksanaan REDD yang berlokasi di dalam kawasan hutan, pelaku REDD adalah pemangku kawasan hutan dan Pemerintah Daerah bukan termasuk pelaku REDD (entitas nasional). Dalam hal ini, khusus untuk karbon kredit melalui mekanisme REDD, Pemerintah Daerah bertindak sebagai pemberi rekomendasi pelaksanaan REDD di daerah.

- c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan / atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung antara lain menjelaskan bahwa Usaha Pemanfaatan

Penyerapan Karbon dan / atau Penyimpanan Karbon (UP RAP-KARBON dan/atau UP PAN-KARBON) merupakan salah satu jenis usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung.

Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain :

- Melakukan pertemuan antara Pemda Kabupaten se Sumatera Barat dan Pemda Provinsi dengan CSG
- Melakukan Konsultasi dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup
- Melakukan Konsultasi dengan Departemen Kehutanan

Mengingat pelaksanaan konsultasi dimaksud dilaksanakan sebelum terbitnya kedua Peraturan Menteri Kehutanan tersebut, menurut hemat kami kedepan diharapkan perlu pengaturan ulang berkaitan dengan rencana kerjasama antara Pemda Provinsi Sumatera Barat dengan CSG karena peraturan berkaitan dengan karbon kredit sudah tersedia.

8. Menanggapi tentang masih ditemuinya kegiatan yang tidak dilanjutkan pengerjaannya di kabupaten dan kota sehingga menjadikan kegiatan tersebut menjadi tidak berguna dan terbengkalai dapat dijelaskan, bahwa saat ini sedang memvalidasi data hasil inventarisasi progres akhir pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diperoleh gambaran kegiatan yang telah dituntaskan dan kegiatan yang tidak dapat terselesaikan pada tahun anggaran 2009 ini.

Selanjutnya untuk mengetahui progres pencapaian kegiatan 2009 secara kuantitatif akan dapat diketahui secara pasti setelah

diadakannya rapat monitoring akhir tahun anggaran 2009 pada tanggal 29 Desember 2009 yang akan datang. Namun sesuai dengan identifikasi permasalahan yang dilakukan angka prosentase kemajuan diprediksi dibawah angka realisasi tahun yang lalu yakni lebih kurang 93 %, mengingat terjadinya Gempa 30 September 2009 yang lalu. Kami telah menerima laporan dari seluruh SKPD berupa kegiatan yang tuntas 100% selesai, kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dan kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali. Dapat kami tambahkan apabila masih ada kegiatan-kegiatan yang terbengkalai tahun 2009 dan akan disediakan pada APBD tahun 2010, tentu akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan tahap III antara SKPD terkait dengan Badan Anggaran DPRD dan TAPD.

9. Berkenaan dengan pertanyaan bahwa Program dan kegiatan yang ditampung pada APBD Tahun 2010 masih bersifat sektoral, dan belum melihat adanya program dan kegiatan yang saling bersinergi satu sama lainnya terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran, dapat dijelaskan bahwa Untuk meningkatkan sinergitas program dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran, diupayakan melalui penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kab/Kota, antara lain melalui rapat-rapat koordinasi secara periodik baik ditingkat Pusat maupun daerah.
10. Sesuai dengan pernyataan bahwa untuk pemulihan kondisi daerah pasca bencana diperkirakan akan menelan biaya Rp.6,4 Milyar, mengingat besarnya biaya yang dibutuhkan, maka dana alokasi

dalam APBD sebesar Rp.207 Milyar perlu ditingkatkan dapat dijelaskan bahwa untuk percepatan proses rekonstruksi dan rehabilitasi, Pemerintah Daerah telah mengusahakan dan mengalokasikan anggaran dari berbagai sumber, antara lain:

- a. Dana Kegiatan Pemulihan Dini/Early Recovery dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rp. 313.933.950.000,- dengan kegiatan berupa persiapan pembangunan gudang logistik, perbaikan perumahan, perbaikan sarana infrastruktur, perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, kegiatan usaha ekonomi produktif, kegiatan lintas sektor dan pendampingan/klinik rehabilitasi dan rekonstruksi seluruh sektor. Kegiatan ini dimulai pada bulan November 2009.
- b. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi dari beberapa Negara Donor
- c. Dana dari LSM/NGO Internasional yang langsung turun ke lokasi bencana pada tahap early recovery
- d. Selain ini Pemerintah Provinsi juga telah mengirim surat kepada Bappenas dan BNPB untuk percepatan turunnya dana yang dibutuhkan untuk pemulihan (infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor) sebesar Rp. 6,417 triliun

Demikian jawaban kami atas pertanyaan, tanggapan dan saran yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar, semoga dapat menerima dan memaklumiya

D. JAWABAN ATAS TANGGAPAN, PERTANYAAN, USUL DAN SARAN DARI FRAKSI PARTAI HANURA

1. Sehubungan dengan harapan agar proses rekonstruksi dan rehabilitasi dapat dipercepat dengan menambah alokasi anggaran penanggulangan bencana melalui APBD Tahun 2010 ini telah dijelaskan pada pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh Fraksi Golkar.
2. Sehubungan dengan pertanyaan mengenai persiapan pemerintah provinsi menghadapi PILKADA serentak kita telah melakukan koordinasi dengan KPUD sehingga pelaksanaan dan pengawasan PILKADA dapat terwujud dengan lancar dan aman.
3. Sehubungan dengan pendapat bahwa masih dimungkinkannya Optimalisasi PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor, Retribusi serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil kerja sama dengan dunia Usaha serta sumbangan pihak Ke III , dapat dijelaskan bahwa target pajak dan retribusi yang dialokasikan dalam Rancangan APBD ini pada prinsipnya sudah melalui pembahasan yang cukup intensif dengan SKPD dan pihak-pihak terkait sebelum dirumuskan dalam Rancangan APBD, namun apabila menurut pendapat Anggota Dewan hal ini masih dimungkinkan untuk ditingkatkan tentu perlu dibahas kembali dengan SKPD terkait pada rapat Pembahasan APBD tahap tiga (III).

Demikian juga halnya dengan optimalisasi PT. Pelindo, Hotel The Hill Bukittinggi, dan PT. Semen Padang perlu kita agendakan waktu khusus untuk membahas dengan management perusahaan yang bersangkutan.

4. Sehubungan dengan saran dari Anggota Dewan Yang Terhormat agar insentif tenaga medis di 4 Rumah Sakit ditingkatkan sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih baik, lebih ramah dan lebih nyaman dapat disampaikan bahwa pemberian insentif tenaga medis telah cukup dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 bahwa hasil pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan dikembalikan ke rumah sakit sebesar 40 %. Sedangkan besar insentif dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2008, serta diperbaharui lagi dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009.
5. Berkaitan dengan saran yang disampaikan agar sosialisasi program Jamkesmas ditingkatkan lagi, agar masyarakat mendapatkan manfaat dari program tersebut, dapat disampaikan bahwa sosialisasi telah dilakukan melalui berbagai cara, baik yang dilakukan oleh RSUD maupun penyuluhan melalui spanduk dan media surat kabar atau media elektronik.
6. Menanggapi hal yang berhubungan dengan pembangunan sektor pertanian yang hanya mendapat plafon anggaran sebesar 1,09 % dari anggaran belanja, disisi lain kontribusi sektor pertanian telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian daerah, yaitu $\pm 29,1\%$ dapat disampaikan bahwa dari data yang

ada struktur perekonomian daerah sampai tahun 2008 masih didominasi oleh tiga sektor, yakni sektor pertanian (29,10%), sektor perdagangan hotel dan restoran (18,46%), dan sektor jasa-jasa (16,26%). Perkembangan ini memperlihatkan pentingnya peran sektor pertanian terutama sub sektor perkebunan dan perikanan di samping sub sektor pertanian tanaman pangan hortikultural dan peternakan. Sedangkan alokasi anggaran untuk sektor tersebut berada pada beberapa urusan seperti urusan pekerjaan umum dalam bentuk perbaikan jaringan irigasi dan pembangunan/ revitalisasi serta penyediaan infrastruktur di kawasan agropolitan.

7. Menjawab pertanyaan tentang perlunya evaluasi secara periodik dalam menempatkan orang-orang sesuai dengan tupoksinya di UPTD agar potensi PAD dapat digali secara profesional, sehingga dapat meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat dapat disampaikan bahwa penempatan PNS dalam suatu jabatan, perlu memperhatikan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai, antara lain riwayat pendidikan, pengalaman jabatan dan kinerja yang bersangkutan.
8. Sehubungan dengan usulan agar penyertaan modal kepada PT. Bank Nagari tetap sebesar minimal 15 Milyar dalam APBD Tahun Anggaran 2010 telah terjawab pada pertanyaan yang senada yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat

9. Menanggapi statement Bapak Gamawan Fauzi untuk tidak lagi menerima investor perkebunan dimasa yang akan datang, dan selanjutnya lahan yang masih tersisa akan dioptimalkan untuk menjadi perkebunan rakyat, namun keinginan dan komitmen tersebut belumlah terlihat dalam program serta kegiatan pada berbagai SKPD terkait, dapat dijelaskan bahwa komitmen tersebut telah ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi dengan menyurati Pemerintah Kabupaten/Kota melalui surat Nomor 522.1/1241/Perek-2009 tanggal 29 September 2009.

Dalam tahun anggaran 2010, sebanyak 6 Kabupaten yakni Kabupaten Solok, Solok Selatan, Agam, Tanah Datar, Dharmasraya dan Pasaman telah menyampaikan lahan yang bisa dijadikan perkebunan rakyat dengan sasaran program optimalisasi pemanfaatan lahan tahun 2010.

Sedangkan dalam bentuk program dan kegiatan telah pula dialokasikannya dalam bentuk :

- a. Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit Rakyat (dalam bentuk pengadaan bibit kelapa sawit siap salur) dengan jumlah dana Rp.950.000.000,-
- b. Pengembangan Tanaman Karet Rakyat (dalam bentuk pengadaan bibit karet siap salur) dengan jumlah dana Rp.1,82 Milyard.
- c. Pengembangan Tanaman kakao dalam bentuk pengadaan bibit kakao siap salur dengan jumlah dana Rp.1,54 Milyard.

Disamping itu melalui APBN tahun 2010 juga telah diprogramkan beberapa kegiatan seperti Perluasan / Pengembangan Tanaman Karet, Kakao melalui Program Tugas Pembantuan (TP) baik TP Kabupaten maupun TP Provinsi . Sedangkan untuk program jangka panjang, direncanakan masing-masing Bupati melalui komitmen bersama dengan Koordinasi Pemda Provinsi, bagi kabupaten yang masih punya potensi lahan yang relatif luas melalui Perusahaan Daerah (PERUSDA) dan dana dari Perbankan atau Sumber dana lainnya dibangun kebun oleh Kelompok Tani / Petani melalui bimbingan instansi terkait.

Selanjutnya sehubungan dengan harapan agar dalam waktu dekat diupayakan penyelesaian perubahan status kawasan hutan lindung menjadi APL, sehingga segala permasalahan yang terkait dengan hutan lindung dapat dicarikan solusi yang lebih arif, serta lahan tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat dapat disampaikan bahwa laporan hasil Tim Terpadu dalam rangka Pengkajian Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Lindung menjadi APL sudah dalam tahap finalisasi. Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan Direktur Perencanaan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, direncanakan pada minggu ketiga bulan Desember 2009 akan dilaksanakan expose laporan hasil penelitian Tim Terpadu dimaksud kepada Menteri Kehutanan dalam rangka memberikan rekomendasi persetujuan teknis kehutanan terhadap perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diusulkan tersebut.

10. Menyangkut langkah kongrit dan kebijakan strategis yang dilakukan pemerintah daerah dan perbankan untuk membantu memulihkan dunia usaha pasca bencana gempa dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan rapat dengan pihak perbankan dan Bank Indonesia, dan pada prinsipnya perbankan siap membantu debiturnya dengan memperhatikan besar kecilnya dampak yang dialami. Selanjutnya kita juga telah menindaklanjutinya dengan melalui surat Wakil Gubernur Nomor 500/1318/Perek-2009 tanggal 28 Oktober 2009 perihal Dukungan Pihak Perbankan terhadap Debitur Pasca Gempa Sumatera Barat.
11. Menjawab pertanyaan anggota Dewan mengenai solusi dan alternatif yang dilakukan dalam upaya mengembangkan fasilitas pelabuhan Teluk Bayur yang sangat strategis dalam meningkatkan sektor transportasi telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Melakukan penyusunan rencana induk / Master Plan Pelabuhan Teluk Bayur tahun 2004 dan telah disahkan oleh Menteri Perhubungan Nomor : 74 tahun 2004 tanggal 01 Oktober 2004
 - b. Study Origin – Destination (asal tujuan) Barang dan Penumpang melalui pelabuhan Teluk Bayur tahun 2004
 - c. Penyusunan Amdal Pelabuhan Teluk Bayur tahun 2006 dan telah disahkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup tahun 2009

- d. Mengundang investor asing yang telah berkunjung dan survey awal serta melakukan presentasi di Pemda Provinsi Sumatera Barat yaitu investor dari : India, China, Belanda
- e. disamping itu pihak PT. (persero) Pelindo II telah menambah fasilitas pelabuhan teluk bayur dengan membangun dermaga / jetty cpo (kelapa sawit) yang dapat disandari kapal oleh cpo dengan panjang \pm 225 meter dengan kapal 30.000 dwt draft 11 meter.

Terkait dengan pengembangan fasilitas pelabuhan teluk bayur kendala yang dihadapi adalah masalah relokasi (pemindahan) masyarakat gaung dan sekitarnya yang terkena dampak pengembangan, terkait juga dengan keinginan Pemerintah Kota Padang dalam memfasilitasi permasalahan tersebut

- 12. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Hanura bahwa pada tanggal 30 September 2009 kita terkena musibah gempa yang telah memporakporandakan negeri ini, untuk itu pada pasca musibah tersebut perlu kiranya pemulihan kondisi daerah secepatnya khususnya daerah yang terkena bencana. Selaitan dengan itu Fraksi Hanura mengharapkan adanya peningkatan alokasi anggaran dari dana yang disediakan dalam RAPBD tahun 2010 yang berjumlah Rp.207 Milyar atau dari sumber yang sah agar proses rekonstruksi dan rehabilitasi dapat dipercepat. Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, telah kami jawab terhadap pertanyaan yang sama dari Fraksi Golkar nomor 10

13. Berkenaan dengan tanggapan perlu adanya peningkatan insentif tenaga medis di 4 RSUD tersebut, sehingga dengan demikian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat akan bisa lebih baik, lebih ramah, dan lebih nyaman, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah daerah telah memberikan insentif untuk tenaga medis pada keempat RSUD sebesar 40% dari retribusi yang diterimanya, sedangkan besarnya disesuaikan dengan standar biaya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 113 tahun 2008 dan telah dirubah dengan peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009.
14. Sehubungan dengan pertanyaan bahwa dalam memberikan jaminan kesehatan pada masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu perlu kiranya ditingkatkan sosialisasi program Jamkesmas, serta memberikan manfaat dari program tersebut, telah dijelaskan pada jawaban atas pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh Fraksi Ukhuwah
15. Memperhatikan pernyataan bahwa di Sumatera Barat sektor pertanian sangat berperan serta telah memberikan kontribusi cukup besar, sebagaimana data struktur perekonomian Sumatera Barat tahun 2008, namun ironisnya dalam APBD urusan pertanian hanya mendapat plafon anggaran sebesar Rp. 19.911.966.000,- dapat dijelaskan bahwa struktur perekonomian daerah sampai tahun 2008 masih didominasi oleh tiga sektor, yakni sektor pertanian (29,10%), sektor perdagangan hotel dan restoran (18,46%), dan sektor jasa-jasa (16,26%). Perkembangan ini memperlihatkan pentingnya peran sektor pertanian terutama sub sektor perkebunan

dan perikanan di samping sub sektor pertanian tanaman pangan hortikultural dan peternakan di dalam perekonomian daerah. Alokasi dana untuk ketiga sektor ini tidak hanya dibiayai dari APBD, tapi juga dari alokasi dana APBN.

Demikian jawaban kami atas pertanyaan, tanggapan dan saran yang disampaikan oleh Fraksi Partai Hanura, semoga dapat menerima dan memakluminya

E. JAWABAN ATAS TANGGAPAN, PERTANYAAN, USUL DAN SARAN DARI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

1. Menanggapi saran perlunya optimalisasi dalam menjalankan fungsi utama pemerintahan daerah terutama fungsi pengaturan, pelayanan dan fungsi pemberdayaan yang terintergrasi dengan kinerja masing-masing SKPD, dapat disampaikan bahwa hal tersebut sudah merupakan suatu kewajiban didalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan melaksanakan sinergifitas program kerja yang saling terintergrasi antar SKPD sehingga akan berdampak kepada efisiensi, efektifitas terhadap capaian kinerja pemerintah daerah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan dan pemerintahan antara pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Sehubungan dengan saran agar pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga penerimaan daerah lebih diarahkan untuk penanganan pemulihan akibat bencana gempa 30 september 2009 tanpa meninggalkan program-program yang sangat mendesak dalam rangka pemberdayaan masyarakat dapat disampaikan bahwa hal tersebut sudah menjadi kesepakatan kita bersama, dengan langkah-langkah kongrit yang tertuang dalam Rancangan APBD ini.
3. Menanggapi saran agar ada sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota tetap memperhatikan pembagian Urusan dan Kewenangan sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 sehingga pembangunan nasional dan pembangunan daerah di semua sector bisa berjalan secara maksimal, komprehensif dan terpadu didalam menghadapi tantangan global sehingga program dan kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota bisa saling menunjang dan tidak tumpang tindih, hal ini juga sudah kita sepakati bersama dalam dokumen perencanaan yang telah kita tetapkan bersama

4. Menanggapi saran agar mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 % dari total APBD diwujudkan pada tahun 2011, sesuai dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, hal ini tentu akan kita bicarakan pada waktu kita menyusun RKPD tahun 2010.
5. Sehubungan dengan pertanyaan bahwa dalam tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi baik fisik maupun non fisik perlu adanya rencana induk, rencana aksi dan disain aplikasi terukur dan terintegrasi dari masing-masing kegiatan dilakukan sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat, hal ini dapat disampaikan bahwa pemulihan akibat bencana alam melalui rehabilitasi dan rekonstruksi didasarkan pada kerusakan dan kerugian (DaLa/Damage and Losses Assessment) dan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca-Bencana Gempa Bumi tahun 2009-2011 yang disusun oleh Bappenas, BNPB, Kementrian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang terkena bencana. Pada rencana aksi

tersebut tercantum: (1) Penjelasan mengenai daerah yang terkena bencana; (2) Deskriptif kerusakan termasuk perkiraan kerugian dan kerusakan serta penilaian kebutuhan untuk recovery masyarakat; (3) Upaya pengurangan dampak bencana; (4) Kerangka kerja rehabilitasi dan rekonstruksi memuat prinsip, Kebijakan dan skenario, Ruang lingkup, serta Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; (5) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi memuat kebijakan pendanaan, mekanisme pendanaan, pengaturan institusi untuk pelaksanaan RR, monev implementasi RR, manajemen asset RR, exit transisi dan keberlanjutan pasca pemulihan RR. Rencana aksi ini dijadikan guideline dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan RR oleh berbagai Kementrian/lembaga, SKPD, Donors, LSM dan pihak lain yang terlibat dalam tahap RR, dengan demikian kegiatan RR tersebut akan terintegrasi dan terkoordinir dengan baik.

6. Menanggapi tanggapan terkait dengan pelaksanaan PILKADA yang akan diselenggarakan pada bulan Juni 2010 sangat diperlukan komunikasi intensif serta koordinasi yang optimal dengan pemerintah Kabupaten/Kota supaya dalam perjalanan dan pelaksanaannya tidak menuai persoalan yang serius, yang nantinya dapat menimbulkan krisis sosial dimasyarakat, hal ini telah diantisipasi dengan mengadakan rapat koordinasi antara instansi terkait secara berkala, sebagaimana telah diuraikan pada jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Fraksi Ukhuwah.

7. Menanggapi saran yang disampaikan bahwa perlu adanya terobosan dan inovasi baru dalam meningkatkan investasi yang masuk ke daerah dengan mengoptimalkan standar pelayanan public yang ramah investasi dapat dijelaskan bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain membuat Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, Peraturan Daerah tentang Pelayanan terpadu satu pintu dan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Terpadu satu pintu. Sedangkan Strategi untuk meningkatkan investasi dilaksanakan melalui pemberian insentif penanaman modal, mempercepat perizinan dengan PTSP dan keringanan bea masuk dan pabean barang
8. Menjawab saran perlu adanya upaya penggaetan dana dari pemerintah pusat dengan memanfaatkan instrumen-instrumen politik yang ada dipusat seperti anggota DPR RI, DPD dan para Menteri yang berasal dari Sumatera Barat guna mengoptimalisasi penyelesaian proyek-proyek yang bersifat strategis sudah dilakukan dan insyallah proyek-proyek yang bersifat strategis tidak dijadwalkan ulang dan tetap diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah dituangkan didalam kontraktual seperti Jembatan Kelok Sembilan, Jembatan Layang Duku serta proyek strategis lainnya.

Demikian jawaban kami atas pertanyaan, tanggapan dan saran yang disampaikan oleh Fraksi Partai PAN, semoga dapat menerima dan memakluminya

F. JAWABAN ATAS TANGGAPAN, PERTANYAAN, USUL DAN SARAN DARI
FRAKSI PARTAI PERJUANGAN REFORMASI

1. Menanggapi pemandangan yang disampaikan bahwa output dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, meningkatkan kehidupan beragama dan sosial serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mutu pendidikan, dapat dijelaskan bahwa pemandangan tersebut benar adanya, karena Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ini merupakan implementasi dari seluruh dokumen perencanaan daerah yang telah menjadi prioritas pada tahun 2010 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Sehubungan dengan saran yang disampaikan bahwa dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi produktif pasca bencana gempa yang lalu perlu diberikan bantuan disektor pertanian, peternakan, perdagangan, industry, usaha kecil dan pasar tradisional hal ini telah dijelaskan pada jawaban terhadap pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat.
3. Menjawab pertanyaan mengenai beberapa persoalan mendasar yang belum terselesaikan pada tahun 2009, agar dapat dituntaskan pada tahun 2010 ini, sesuai dengan RPJM dan Visi Misi Gubernur pada akhir masa jabatannya dan pertanyaan tentang sasaran agenda meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya, kami sangat mendukung apa yang disarankan tersebut. Untuk itu

beberapa persoalan mendasar yang belum terselesaikan pada tahun 2009 akan diupayakan dituntaskan pada tahun 2010 sesuai dengan target RPJM 2006-2010 . Salah satu pertimbangan untuk penentuan prioritas pembangunan tahun 2010 adalah hasil evaluasi tiga tahun RPJMD, sehingga hal-hal yang belum terselesaikan tahun sebelumnya kita upayakan untuk dapat dituntaskan pada tahun ini, antara lain agenda meningkatkan kualitas hidup beragama dan sosial budaya, meningkatnya kualitas ibadah dan meningkatnya akhlak masyarakat, meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana keagamaan dalam menyiarkan kehidupan beragama, meningkatkan pemahaman masyarakat akan nilai budaya minangkabau, meningkatkan rasa memiliki budaya Minangkabau bagi masyarakat Sumatera Barat.

4. Sedangkan menanggapi hal yang berkaitan dengan landasan pemahaman dan penanaman nilai budaya minangkabau sejak dini tidak terlihat pada generasi muda, sehingga generasi muda kita merasa asing dengan budayanya sendiri. Hal ini juga telah dilakukan dengan pelatihan terhadap pengurus OSIS, pengurus BEM, dan ormas kepemudaan dengan harapan dapat mendorong seluruh stakeholders terkait untuk meningkatkan pemahaman dan penanaman nilai budaya sehingga generasi muda kita merasa memiliki budayanya sendiri.
5. Sehubungan dengan tanggapan dan pernyataan bahwa membangun SDM berkualitas, perlu memperhatikan skala prioritas apakah akan mendahulukan yang wajib atau yang mendesak agar tepat

penggunaannya sehingga tidak menimbulkan permasalahan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pembangunan SDM berkualitas sesuai amanat RPJMD Sumbar 2006-2010 secara bertahap dan berkelanjutan telah kita lakukan. Hal ini tergambar dari kegiatan yang kita lakukan setiap tahunnya melalui APBD. Dari data hasil ujian nasional terdapat kecenderungan peningkatan rata-rata nilai yang diperoleh siswa, kalau untuk tingkat SMP/MTs. pada tahun pelajaran 2005/2006 adalah 21,55, maka pada tahun pelajaran 2008/2009 rata-rata nilai ujian nasional SMP adalah 28,99 sedangkan untuk tingkat SMA/MA jurusan IPA rata-rata hasil UN tahun pelajaran 2005/2006 adalah 23,58 dan ini meningkat pada tahun pelajaran 2008/2009 menjadi 45,43 sedangkan untuk jurusan IPS dari 21,33 tahun pelajaran 2005/2006 menjadi 41,37 pada tahun pelajaran 2008/2009. Sedangkan untuk prosentase kelulusan terjadi fluktuasi, namun tetap di atas 90 %
- b. Berkaitan dengan pemberantasan buta aksara, juga menjadi fokus kegiatan kita. Kita menyadari melalui melek aksara, seseorang dapat meningkatkan kapasitas dirinya, untuk tahun 2009 ini angka buta aksara kita terdapat 24.234 orang (0,02%) dan angka ini jauh lebih rendah dari rata-rata nasional yang diatas 5%. Dan kita tetap melakukan berbagai upaya untuk pemberantasan buta aksara ini, hal ini tergambar melalui anggaran yang kita sediakan tahun 2009 dari APBN dialokasikan

sebesar Rp 3.494.735.000,- dan dari APBD sebesar Rp 1.644.380.000,- kita berharap ada juga APBD kabupaten/kota. Namun demikian pemberantasan buta aksara ini harus berkelanjutan, sebab bila tahun ini mereka telah melek aksara dan pada tahun yang akan datang bila tidak dilanjutkan, maka mereka akan kembali ke kondisi semula.

6. Sehubungan dengan tanggapan terhadap program pemerintah dalam mempercepat penurunan tingkat kemiskinan sudah terjawab pada pertanyaan yang sama disampaikan oleh Fraksi Partai Ukhuwah
7. Menanggapi saran yang disampaikan ke depan Pemerintah Daerah agar lebih selektif dalam menetapkan prioritas pembangunan, jangan sampai terlalu bernafsu untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai sentra segala-galanya, saran tersebut akan menjadi perhatian kita bersama untuk masa yang akan datang dalam menyusun perencanaan Tahun Anggaran 2010

Demikian jawaban kami atas pertanyaan, tanggapan dan saran yang disampaikan oleh Fraksi Partai Perjuangan Reformasi, semoga dapat menerima dan memakluminya

G. JAWABAN ATAS TANGGAPAN, PERTANYAAN, USUL DAN SARAN DARI FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

- 1.a. Berkenaan dengan penjelasan mengenai cara memformulasikan target-target RPJMD 2010, dalam penyusunan Rancangan APBD 2010, diawali dengan mekanisme perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana yang diamanatkan UU No.25 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah dijelaskan pada pertanyaan yang sama yang diajukan oleh Fraksi Ukhuwah tentang mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan.
- b. Berkaitan dengan pertanyaan target apa saja yang kira-kira tidak akan terealisasi pada Rancangan APBD terakhir ini, dan apa permasalahannya bila tidak tercapai, dapat dijelaskan bahwa target-target kinerja makro yang telah kita tetapkan dalam RPJMD apabila kemungkinan tidak dapat terealisasi sudah kita upayakan dikoreksi seperti laju pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sebesar 6,9 % dalam RPJMD, maka target dalam KUA dan PPAS Rancangan APBD sebesar 5,66 %, begitu juga terhadap penurunan jumlah penduduk miskin 9,54% pada tahun 2009 dari target RPJMD sebesar 10,44%. Permasalahannya adalah terjadinya krisis keuangan global dan bencana gempa bumi dan lain sebagainya, yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- c. Berkenaan dengan pertanyaan tentang prediksi capaian target penurunan jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka dan peningkatan investasi, mengingat target ini sering

dilakukan koreksi dari target semula, dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2010 target penduduk miskin dalam RPJMD adalah sebesar 10 %. target peningkatan investasi terutama PMA dan PMDN diprediksi 6,82 % . Berdasarkan informasi dari BPS, data yang akurat baru dapat disampaikan pada bulan Juli tahun 2010, setelah Susenas dilaksanakan.

- 2.a. Mengenai pertanyaan tentang darimana sajakah dana yang berhasil dihimpun oleh Pemerintah Provinsi, maupun sumbangan dari pihak luar yang masuk ke Kas Daerah dan apakah yang dilaporkan pada rapat tanggal 1 Desember 2009 sudah merupakan keseluruhan dana yang terkumpul, dapat kami jelaskan bahwa Dana yang masuk berasal dari berbagai elemen baik bantuan dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, LSM dalam dan luar negeri, perusahaan dan perseorangan. Jumlah yang dilaporkan pada tanggal 1 Desember 2009 sudah merupakan keseluruhan dana yang terhimpun sampai tanggal tersebut, dan tentunya akan terus bertambah sesuai dengan masih tetap mengalirnya bantuan dari berbagai pihak.
- b. Terhadap pertanyaan mengenai konsep dan pola yang dipakai dalam melakukan tahapan recovery, rehabilitasi, maupun rekonstruksi pasca tanggap darurat serta atas dasar apa rencana tersebut dirancang akan selesai dalam kurun waktu 2 (dua) tahun kedepan dapat kami jelaskan bahwa konsep dan pola yang diterapkan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi adalah sesuai dengan dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

gempa yang disusun bersama antara pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dasar penetapan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi selesai dalam jangka waktu dua tahun adalah dengan adanya pertimbangan teknis, bahwa masa dua tahun untuk recovery bencana sudah cukup cepat untuk pemulihan masyarakat di seluruh sektor, disamping itu untuk melaksanakan recovery juga diperlukan waktu untuk perencanaan infrastruktur, irigasi dan transportasi yang rusak serta waktu pelaksanaan yang cepat. Sedangkan anggaran akan mengikuti perencanaan dan pelaksanaan yang disusun, sehingga waktu dua tahun merupakan waktu yang cepat untuk penyelesaian perencanaan dan pelaksanaan

- c. Sehubungan dengan pertanyaan bagaimana koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota yang terkena gempa, berkaitan dengan peran dan tanggungjawab masing-masing pihak dapat dijelaskan bahwa koordinasi dan sinkronisasi sudah berjalan dengan baik sejak mulai tahap tanggap darurat, yaitu pendataan, verifikasi data, penyaluran bantuan sampai dengan penyusunan dokumen kerusakan dan kerugian, rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi selalu dilakukan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dan masing-masing pihak diharapkan perannya sesuai dengan kewenangan, karena tidak semua kerusakan dan kerugian akan ditanggung oleh pemerintah.

- d. Berkenaan dengan tanggapan mengenai anggaran untuk recovery ekonomi pada Rancangan APBD 2010 yang tercermin pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan maupun Koperindag sudah berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan berkaitan dengan kerusakan yang menimpa wilayah Sumbar, yang menjadikan masyarakat kehilangan mata pencaharian, lahan pertanian, perkebunan dan fasilitas ekonomi produktif lainnya dapat dijelaskan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk recovery ekonomi sebesar Rp.300.000.000,- memang terlalu kecil dari total anggaran Dinas Perkebunan sebesar Rp.5.814.122.000,- tetapi secara implisit anggaran untuk recovery ekonomi tersebut ada dalam pengembangan bibit kakao sebesar Rp.1.350.000.000,- dalam bentuk penyediaan bantuan bibit, sebahagiannya disalurkan kepada daerah yang terkena musibah gempa.

Sebagai tambahan diupayakan melalui pengalokasian dana lainnya dari APBN, Hibah dan bantuan lainnya, yang direncanakan secara sinergis sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.

- 3.a. Menjawab pertanyaan sehubungan dengan perkiraan potensi pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terutama di daerah perbatasan atau daerah yang susah dijangkau dapat disampaikan bahwa perkiraan potensi PKB pada daerah perbatasan (Pasaman Barat, 50 Kota, Pasaman, Dharmasraya, Solok Selatan dan Pesisir Selatan) diperkirakan sebanyak 152.272 unit kendaraan dengan perkiraan penerimaan sebesar

Rp.63 milyar, dimana sebesar 22,1 % berada di Kecamatan perbatasan yaitu 33.652 unit dengan perkiraan penerimaan sebesar Rp.15,750 milyar. Dalam rangka percepatan pemasukan penerimaan PKB tersebut dan sekaligus untuk mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak yang jauh dari kantor pelayanan Samsat, pada tahun 2010 direncanakan penambahan pengoperasian 3 (tiga) kendaraan Samsat Keliling untuk Kecamatan di perbatasan dimaksud.

- b. Mengenai tanggapan tentang upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi kepada PT.Semen Padang untuk meningkatkan kontribusinya kepada masyarakat Sumatera Barat dari Rp.10,-/zak menjadi Rp.75,-/zak semen. Dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengupayakan peningkatan kontribusi PT.Semen Padang kepada masyarakat Sumatera Barat yaitu dengan menyurati PT.Semen Padang melalui surat Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor 530/1271/Perek-2009 tanggal 14 Oktober 2009 tetapi sampai saat ini belum ditanggapi. Karena peningkatan kontribusi ini membutuhkan pemahaman maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengagendakan rapat tanggal 28 Desember 2009 dengan PT.Semen Padang dalam upaya meningkatkan kontribusi tersebut.
- c. Berkenaan dengan pertanyaan mengenai Dana Alokasi Khusus yang turun sangat tajam pada Tahun 2010, apakah disebabkan karena tidak maksimalnya upaya kita melakukan pendekatan ke

Departemen terkait, dapat dijelaskan bahwa tahun 2010 secara nasional pagu alokasi DAK terjadi penurunan dari tahun lalu sebesar 14,85 %, disamping itu juga terjadi reformulasi dan penajaman kriteria alokasi DAK, dalam rangka menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah tertinggal, daerah pesisir dan kepulauan, dan daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah rawan bencana serta daerah yang termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata, jadi bukan disebabkan tidak maksimalnya upaya pendekatan dengan departemen terkait.

4. Menjawab pertanyaan tentang tidak sepadannya kenaikan DAU sebesar 1,95% dibandingkan dengan kenaikan Belanja Pegawai sebesar 24,41% dapat dijelaskan bahwa penambahan alokasi DAU tidak berbanding lurus dengan penambahan alokasi belanja pegawai, karena belanja pegawai terdiri dari belanja gaji dan tunjangan pegawai, belanja DPRD, Tambahan Penghasilan PNS dan biaya pemungutan pajak daerah.
5. Sehubungan dengan pertanyaan mengenai sejauhmana kemajuan fisik dan keuangan pembangunan Masjid Raya sampai saat ini, dapat disampaikan bahwa sesuai kesepakatan dengan DPRD Provinsi, bahwa pembangunan Masjid Raya merupakan komitmen kita untuk membangun simbol pembinaan kehidupan beragama di Sumatera Barat yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Untuk itu telah dialokasikan dana sebesar Rp.100 milyar untuk

pembangunan Masjid Raya tahap I. Setelah proses tender, maka total biaya yang diperlukan untuk pembangunan Masjid Raya tahap I adalah sebesar Rp.96.875.000.000,-. Hingga bulan Oktober 2009 pembangunan fisik struktur Masjid Raya telah mencapai 100% dengan realisasi fisik keuangan sebesar 86,5% dan diperkirakan awal Desember ini realisasi keuangan mencapai 100%.

Kita telah mengupayakan agar pembangunan Masjid Raya yang akan menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat ini tidak berhenti begitu saja, sehingga amatlah perlu dialokasikan dana agar sekurang-kurangnya Masjid Raya ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk aktivitas ibadah masyarakat.

6. Menjawab pertanyaan sejauh mana perkembangan pembahasan Rancangan APBD Kabupaten/Kota tahun 2010 yang dikaitkan dengan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah dan pemerintah propinsi dapat dijelaskan bahwa untuk Kabupaten/Kota yang sudah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2010 pada DPKD Provinsi untuk dievaluasi adalah Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh dan Kota Sawahlunto, dan ketiga Kabupaten Kota ini juga telah menetapkan APBD tepat pada waktunya. Sedangkan untuk 16 Kabupaten/Kota lainnya masih dalam tahap proses pembahasan pada masing-masing daerah.
7. Berkenaan dengan informasi tentang target pembangunan fisik yang terbengkalai pada tahun terakhir RPJMD 2005-2010 telah dijelaskan pada jawaban pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh Fraksi Golkar.

8. Berkaitan dengan harapan yang disampaikan agar kedepan kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat, hal ini akan menjadi perhatian kita bersama ditahun yang akan datang. Namun sebagai informasi dapat disampaikan bahwa pada prinsipnya sosialisasi kegiatan pemerintah maupun provinsi dilakukan secara bertahap dan bertingkat, pertama pemerintah melakukan sosialisasi dengan mengundang provinsi ke pusat, kedua pemerintah melakukan sosialisasi ditingkat provinsi dengan mengundang pemerintah kabupaten/Kota dan instansi terkait, selanjutnya sosialisasi kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
9. Berkaitan dengan pelaksanaan PILKADA serentak , bagaimana pola sharing dana antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten/kota dan berapa penghematan anggarannya telah terjawab pada jawaban atas pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat.
10. Berkaitan dengan pertanyaan masih dianggarkannya KPID pada pos bantuan, sedangkan berdasarkan informasi yang diterima KPID sudah merupakan salah satu SKPD, dapat dijelaskan bahwa pada Rancangan APBD Tahun 2010 belum menganggarkan KPID ini sebagai perangkat daerah karena Rancangan Peraturan Daerahnya belum final.

11. Sehubungan dengan permintaan agar disediakan alokasi anggaran yang memadai untuk MUI, dapat dijelaskan bahwa bagi organisasi yang kegiatannya menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah, penganggarannya disediakan secara khusus pada belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan, sedangkan besaran bantuan yang akan diberikan disesuaikan dengan petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2010.

12. Menanggapi saran agar Gubernur sesegera mungkin mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya yang sesuai dengan perkembangan dan kondisi di lapangan agar pelaksanaan pembangunan di tahun 2010 berjalan tepat waktu setelah Rancangan APBD 2010 disahkan nantinya menjadi Peraturan Daerah, dapat disampaikan bahwa sampai saat ini peraturan kepala daerah dimaksud telah diterbitkan dan sudah siap untuk diedarkan kepada seluruh SKPD dilingkungan Pemda Provinsi Sumatera Barat.

Demikian jawaban kami atas pertanyaan, tanggapan, saran dan usul yang disampaikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera semoga dapat memenuhi harapan serta memahami dan menerimanya.

H. JAWABAN ATAS TANGGAPAN, PERTANYAAN, USUL DAN SARAN DARI FRAKSI PARTAI GERINDRA

1. Sehubungan dengan pertanyaan mengenai dampak terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dengan terjadinya bencana gempa, dapat disampaikan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ini adalah rencana keuangan daerah dalam rangka mengimplementasikan atau menjabarkan hasil kesepakatan kita dalam KUA dan PPAS pada tanggal 3 Desember 2009 yang lalu, sehingga secara substansi tidak berdampak langsung terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ini karena dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPAS yang lalu, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan telah disesuaikan dengan pemulihan pasca bencana.

Namun secara proses, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2010 ini tentu mempunyai dampak yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu, dimana persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2009 telah dapat disetujui tanggal 24 Novermber 2009 sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada tanggal 23 Desember 2009. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa persetujuan bersama antara kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditanda tangani paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun

anggaran berakhir. Sedangkan pada proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2010 ini, persetujuan bersama sesuai jadwal baru dapat disetujui tanggal 23 Desember 2009 sehingga penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ini tidak dapat kita lakukan sesuai dengan ketentuan tersebut diatas.

Dapat diinformasikan bahwa salah satu indikator kita mendapatkan financial reward karena telah dapat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sesuai ketentuan tersebut diatas selama 2 tahun berturut-turut.

2. Mengenai pertanyaan tentang kenapa anggaran pendidikan masih jauh dari tuntutan konstitusi 20%, telah terjawab pada pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat.
3. Menanggapi saran tentang mesti ada sinkronisasi penganggaran yang disesuaikan dengan dampak gempa dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), kami sangat mendukung saran tersebut sebagaimana telah disampaikan diatas.
4. Menanggapi saran tentang mesti ada planning anggaran yang lebih cermat sejalan dengan prioritas pembangunan tentang pendidikan pariwisata, pertanian dan pemberdayaan masyarakat miskin, kami juga memberikan apresiasi dan sangat mendukung saran dan masukan demi untuk penajaman perencanaan dan penganggaran untuk merespon kebutuhan bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin ke depan.
5. Menanggapi saran yang disampaikan bahwa untuk menyikapi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana diharapkan kepada

pihak perbankan khususnya Bank Nagari untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pembangunan perekonomian telah dijelaskan pada saran yang sama yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat dan Fraksi Hanura.

6. Menanggapi saran tentang sudah seharusnya mulai dipikirkan perencanaan anggaran yang tidak terpaku pada plafon, tapi lebih menekankan pada rasionalisasi yang disesuaikan dengan skala prioritas yang terencana dan terukur, telah dijelaskan pada pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh Fraksi Ukhuwah.
7. Saran tentang mestinya ada data yang komprehensif dan terintegrasi baik dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif yang bisa dijadikan bahan referensi evaluasi dan perencanaan anggaran kedepan, berkaitan dengan saran tersebut kami sependapat dalam melakukan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan maupun untuk perencanaan anggaran ke depan perlu adanya data yang akurat dan komprehensif baik kualitatif maupun kuantitatif. Dalam evaluasi tiga tahun pelaksanaan RPJM data indicator kinerja makro maupun capaian kinerja program digambarkan dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif, karena tanpa adanya data yang akurat dan komprehensif maka analisa dan evaluasi akan menjadi bias.

Demikian jawaban kami atas pertanyaan, tanggapan, saran dan usul yang disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra semoga dapat memenuhi harapan serta memahami dan menerimanya.

III. PENUTUP

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat serta para hadirin yang kami muliakan.

Demikianlah beberapa hal yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, sebagai jawaban maupun penjelasan atas pertanyaan, saran, himbauan dan pendapat yang telah disampaikan oleh Fraksi-fraksi dalam pemandangan Umum yang lalu, kiranya dengan penyampaian jawaban dan penjelasan yang kami kemukakan diatas, dapat memenuhi harapan dan berkenan dihati Anggota Dewan Yang Terhormat. Namun seandainya masih ada hal-hal yang belum terjawab ataupun masih terdapat kekurangan-kekurangannya, kita lanjutkan pada pembahasan tahap III. Oleh sebab itu melalui kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan maaf apabila dalam jawaban masih ada kekurangan.

Akhirnya kepada Alllah Tuhan Yang Maha Kuasa jualah kita semua minta pertolongan dan petunjuk, yaitu jalan yang lurus dan benar, bukan jalan bagi orang-orang yang tersesat dan dimurkai-Nya.

Amin ya Rabbal'aallamiin.

Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, 13 Desember 2009
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MARLIS RAHMAN